



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA MARGA, DIRJEN CIPTA KARYA, DIRJEN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN, DAN KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu : Pukul 10.20 s.d. 13.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom
Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi
V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2022
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
44 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 3. Sukur H. Nababan, S.T.
 4. Ir. Sudjadi
 5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 6. Sri Rahayu
 7. Ir. Effendi Sianipar
 8. Harvey B. Malaihollo
 9. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS
 10. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 5. Muhammad Fauzi, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
7 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Sudewo, S.T., M.T.
 4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
 7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 4. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 4. Lasmi Indaryani, S.E.
 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
 4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. H. Boyman Harun, S.H.
4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.)
2. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI (Ir. Diana Kusumastuti, M.T.)
3. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.)
4. Kepala BPIW Kementerian PUPR RI (Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE):

Bisa kita mulai, Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan
Infrastruktur, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian PUPR, beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat *wal'afiat* baik secara fisik maupun secara virtual.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah menandatangani sebanyak 29 orang, fisik 12 orang dan virtual 17 orang, terdiri dari 7 fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada

hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini, kami buka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada para Dirjen dan Kepala BPIW yang telah hadir secara fisik serta turut menghadirkan secara virtual para Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah seluruh Indonesia, para Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional seluruh Indonesia dalam rapat dengan pendapat pada hari ini.

Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, para Dirjen, dan Kepala BPIW yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, Komisi V DPR RI dalam melakukan Rapat Kerja dengan Menteri PUPR dan sebagai tindak lanjut hari ini dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Eselon I Kementerian PUPR. Sesuai surat undangan agenda rapat hari ini adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2003 untuk masing-masing unit Eselon I Kementerian PUPR.

Untuk agenda pertama, yaitu evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari para Dirjen dan Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai hasil akhir pencapaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi V DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya.

Selanjutnya, terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2023. Perlu kami sampaikan bahwa Pagu Anggaran Ditjen Cipta Karya sebesar 25,03 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar 49,31 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar (suara kurang jelas) miliar, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 140,76 miliar. Dengan lokasi anggaran ini kami ingin mengetahui bagaimana Pagu anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu.

Berdasarkan pengawasan dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Perlu meningkatkan koordinasi antara Ditjen Cipta Karya dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses serah terima aset infrastruktur di berbagai provinsi atau kabupaten;
2. Perlu untuk memperkuat ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar, seperti pembangunan jalan tol, preservasi jalan nasional, dan pembangunan jembatan penghubung;
3. Perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU agar hasilnya lebih tepat sasaran;

4. Perlu meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikianlah pengantar dari kami, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR untuk menyampaikan penjelasannya.

Kita persilahkan siapa duluan, saya dengar kabar bahwa Pak Dirjen Bina Marga ada urusan jam 2 ya, semua? Semua jam 2 ya, ya kalau begitu kalau bisa kita sepakati kita persingkat saja ya, dibaca singkat saja *anu-nya* pemberian penjelasannya dan kepada teman-teman juga Anggota Komisi yang bertanya juga nanti seperlunya.

Baik, kita persilakan siapa duluan? Ya, Pak Dirjen Bina Marga, silakan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,*

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,

Izinkan kami untuk sesuai agenda, menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2022 dan juga Program Kerja untuk 2023.

Kami sampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran 2022 senilai 39,70 triliun, kemudian kita ada revisi, sehingga totalnya menjadi 58,14 triliun. Ini karena adanya tambahan anggaran untuk dukungan G20, luncuran SBSN, kemudian luncuran dan percepatan PHLN, bencana, IKN, kemudian juga ada kewajiban kami untuk mencatat Pagu ELMAN untuk Bina Marga, jadi ini hanya pencatatan di buku saja.

Kami laporkan juga Realisasi Keuangan 93,71% atau ada deviasi - 7,29% dan fisik mencapai 96,13%. Ini ketidakserapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN, sedikit, karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang memang tidak mungkin kita revisi.

Kemudian capaiannya kami laporkan, pembangunan jalan tol sepanjang 163 kilometer, kemudian pembangunan jalan baru 468 kilometer,

pembangunan jembatan 20.759 meter, kemudian *flyover* dan *underpass* sepanjang 1.128 meter.

Kami laporkan juga capaian pembangunan jalan tol 2020-2022 adalah sepanjang 511,11 kilometer. Ditargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 509 kilometer pada Tahun 2023 dan 385,5 kilometer pada Tahun 2024, ini mayoritas dibiayai oleh investasi. Sehingga, total jalan tol yang terbangun pada Tahun 2020-2024 adalah sepanjang kira-kira 1.405 kilometer.

Nah, dari hal, dalam hal capaian renstra kami laporkan bahwa target waktu tempuh untuk renstra itu adalah 1,9 jam per 100 kilometer, kemudian jalan tol baru atau sudah beroperasi sepanjang 2.500 kilometer, kemudian jalan nasional baru 3.000 kilometer, dan nilai rating kondisi jalan 2,5 atau setara dengan kemantapan jalan nasional sebesar 97%.

Berdasarkan target kumulatif renstra sampai dengan 2022, target waktu tempuh akhir 2022 seharusnya adalah 2,09 jam per 100 kilometer, jalan tol baru atau sudah beroperasi kumulatif 947 kilometer, kemudian jalan nasional baru kumulatif 1.745 kilometer, dan nilai rating kondisi 2,61 atau setara 95%. *Nah*, ini kalau kita bandingkan dengan capaian waktu tempuh kita adalah di 2,24 jam per 100 kilometer, jadi masih cukup jauh dari 2,09 jam per 100 kilometer, kemudian jalan tol baru 511 kilometer juga di bawah target, jalan nasional baru 1.444 kilometer, dan nilai rating kondisi kira-kira setara dengan kemantapan 92%, jadi masih ada *gap* 3%. Ini, hal ini terjadi karena memang kita memahami adanya *backlog* anggaran.

Kemudian Agenda Prioritas untuk 2022 adalah pembangunan infrastruktur di PSN, kemudian dukungan infrastruktur di IKN, kemudian dukungan acara-acara internasional di Bali, Jakarta, NTB, dan NTT, kemudian pengembangan kawasan *food estate*, pengembangan 5 DPSP, kemudian program padat karya tunai, pembangunan jembatan gantung, dan penanganan darurat pasca bencana.

Kami laporkan berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020 dan Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 terdapat 53 PSN di bidang jalan tol dengan saat ini telah selesai 6 proyek, mohon maaf. Telah selesai, mohon maaf 6 proyek telah selesai, 34 masih berjalan, dan 13 belum dilaksanakan. Kemudian, terdapat 16 kegiatan infrastruktur dukungan IKN senilai 10,726 triliun dengan rincian 9 kegiatan konstruksi penggunaan infrastruktur dengan Pagu 8,753 triliun. Kemudian, 7 kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur di kawasan inti dengan Pagu 1,973 triliun.

Ditjen Bina Marga juga kami melaporkan telah melaksanakan penanganan infrastruktur dukungan penyelenggaraan acara internasional, yaitu G20 di Bali sebesar 382,9 miliar, kemudian penataan TMII dengan Pagu 127,3 miliar, penataan Mandalika 357,9 miliar, penataan Tanamori dengan Pagu 487,2 miliar.

Penanganan infrastruktur pada kawasan *food estate*, antara lain di Kalimantan Tengah dengan 159 miliar, kemudian Humhas, Humbang Hasundutan dengan Pagu 32,9 miliar.

Kemudian, penanganan jalan dan jembatan dukungan 5 kawasan DPSP, yang pertama Toba sebesar 455 miliar, Borobudur 6,3 miliar, Mandalika 350,2 miliar, Labuan Bajo 481,5 miliar, dan Likupang 83,2 miliar.

Untuk padat karya kami melaporkan nilai padat karya di Tahun 2022 senilai sekitar 4 triliun dengan rencana penyerapan tenaga kerja 59.766 orang. Progresnya cukup baik penyerapan tenaga kerja sudah lebih dari rencana 73.605 orang atau 123%.

Kemudian untuk jembatan gantung kami laporkan ada 77 unit yang tersebar di DKI, di Jabar, kemudian di Jateng, kemudian Jatim, Bali, Kaltim, Sulsel, Sumsel, Sumut, Aceh, Banten, Jambi, Kalbar, Kepri, Lampung, NTB, Papua Barat, Riau, Sultra, Sulut, dan Sumatera Barat.

Kemudian, kami laporkan juga penanganan beberapa bencana di Tahun 2022, yaitu Sitinjau Lauik. Ini kita sudah lakukan penanganan darurat dan nanti kita akan selesaikan dengan cara KPBU AP untuk penanganan permanennya. Kemudian, perbaikan yang terkait jembatan gantung Lumban Soit sudah selesai dilaksanakan. Kemudian, longsor di Majene-Mamuju pada tanggal 27 Oktober telah ditangani, mulai pembersihan material, kemudian kita sedang desain permanennya. Kemudian, longsor Kabupaten Trenggalek 6 November telah ditangani, kemudian bencana gempa di Kabupaten Cianjur ini telah ditangani secara darurat perbaikan jalan, dan kita sekarang sedang melakukan kajian untuk peningkatan faktor keamanannya karena ternyata ruas tersebut terpotong oleh sesar. Kemudian, terdapat beberapa infrastruktur yang telah diresmikan seperti Jembatan Gantung Girpasang, kemudian Guyangan, Pagar Gunung, Jembatan Gantung Siron di Aceh, kemudian Wear Fair di Maluku, kemudian juga kita meresmikan Tol Cibitung-Cilincing Jawa Barat, dan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

Baik, Pimpinan, itu saya kira yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di 2022. Ini kami laporkan mungkin yang lebih menarik lagi adalah masalah 2023, ini ada beberapa hal yang perlu kami laporkan terkait dinamika pemograman di 2023 ini. Jadi, kami sampaikan bahwa posisi terakhir Pagu adalah 49,31 triliun untuk Bina Marga di Tahun 2023 dengan rupiah murni sebesar 34,93 triliun, SBSN sebesar 12,29 triliun, dan pinjaman hibah luar negeri (PHLN) sebesar 2,09 triliun.

Ini kami laporkan dari posisi anggaran awal ini, *backlog* kumulatif Ditjen Bina Marga untuk RPJMN ini adalah sebesar sampai Tahun 2023 ini sebesar 77 triliun. Jadi, ini kami mohon pemahamannya juga bahwa khusus terutama yang berkaitan dengan kondisi jalan, karena kita ada target kemantapan 2023 itu 96%, ini *backlog*-nya itu adalah sebesar 21 triliun, jadi sangat sulit untuk dicapai kemantapan 96%. Ini dibutuhkan itu tambahan anggaran preservasi sebesar 30 triliun khusus untuk preservasi kalau kita ingin mencapai kemantapan 96%. Jadi, prediksi kita kemantapan di akhir 2023 adalah sebesar

93,57%. Jadi, artinya ini ada 3.500 kilometer jalan kita yang memang tidak tertangani secara baik di ruas jalan nasional.

Kemudian, kami laporkan postur anggaran ini 49,31 triliun ini IKN ada 8,73 triliun atau 17,71%, kemudian regulernya 40,58 triliun. Kemudian, kami juga melaporkan adanya kebijakan mengenai *automatic adjustment* untuk Bina Marga kita akan kena bintang atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita eksekusi senilai 3 triliun. *Nah*, ini dari 40,58 triliun ini konektivitas itu adalah mohon maaf dari 49,31 triliun konektivitas itu adalah sebesar kira-kira 38 triliun itu adalah 77,48%, dan ini ada *komite* di dalamnya sebesar 16,53 triliun itu SBSN, kemudian juga untuk dukungan PHLN dan pendampingnya.

Kemudian, yang *non committed* sebesar 21,68 triliun, dari *non committed* ini ada yang sudah betul-betul temanya sifatnya wajib, seperti jembatan gantung, rutin jalan karena ini tidak bisa kita tinggalkan, lahan tol, kemudian alokasi untuk siap siaga bencana alam itu sebesar 3,45 triliun. Dan, sisanya sebesar 18,23 triliun itu dialokasikan untuk preservasi jalan dan jembatan sebesar 10,95 triliun di mana di situ ada blokir AA tadi sebesar 0,21 triliun. Kemudian, yang pembangunan duplikasi jembatan ini sedikit 0,21 triliun tapi blokir AA-nya hampir seluruhnya 0,68 triliun. Kemudian, pembangunan jalan 1,13 triliun tapi kena blokir 0,84 triliun, kemudian jalan bebas hambatan sekitar 1,09 triliun kena blokir 0,85 triliun. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang di luar penanganan perkerasan, dan penggantian jembatan, serta dukungan teknis (suara kurang jelas) itu sebesar 2,8 triliun. Jadi, kita lihat memang ruang kita untuk anggaran ini sudah sangat sempit sekali, ruang fiskal kita. Kemudian, dukungan manajemen 2,37 triliun.

Kami laporkan rencana padat karya ini 2023 mestinya itu adalah sebesar 4,78 triliun dengan tenaga kerja sebanyak rencananya 80.000 orang. *Nah*, realisasi keuangan kami laporkan untuk tahun ini berdasarkan status 20 Januari kemarin itu adalah sebesar 0,24% masih kecil dan fisiknya sebesar 1,21%.

Kami laporkan ada 1.488 paket kontraktual dengan Pagu 35,69 triliun. Ada *single years* 921 paket, kemudian *multi years* baru sebanyak 156 paket, dan *multi years* lanjutan sebanyak 411 paket. Saat ini progresnya kami laporkan yang sudah terkontrak ada 451 paket, kemudian yang persiapan 51 paket, kemudian proses lelang masih lelang ada cukup besar 638 paket senilai total 7 triliun, ini belum lelang masih ada 347 paket dengan Pagu 7,11 triliun dan ini saat ini sudah ada yang gagal lelang 1 paket.

Saya kira itu yang bisa kami laporkan Bapak Pimpinan, dan kami mohon masukan-masukannya dari Pimpinan dan juga dari yang kami hormati para Anggota Komisi V.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen Bina Marga.
Ibu Dirjen, silakan.

**DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR (Ir. DIANA KUSUMASTUTI,
M.T.):**

Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pimpinan Komisi V DPR RI serta seluruh Anggota Komisi V DPR RI, serta Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, kemudian juga Kepala BPIW, serta seluruh pejabat tinggi pratama yang hadir pada rapat RDP hari ini,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Mohon izin, Bapak Pimpinan, kami akan menyampaikan terkait dengan dua hal, yaitu Capaian Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2022 sekaligus juga Rencana Program Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun 2022 Ditjen Cipta Karya diamanahkan untuk mengelola Pagu anggaran sebesar 17,6 triliun. Alokasi ini meningkat sebesar 40,69% atau 5,09 triliun dari Dipa awal, Tahun 2022, yaitu sebesar 12,51 triliun. Porsi tersebut, terbesar ini adalah penambahan dalam rangka untuk mendukung kegiatan presidensi G20 sebesar 1,1 triliun dan juga untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara 2,3 triliun.

Adapun, Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022 adalah sebesar 95%, sedangkan untuk realisasi fisiknya besar 96,9%. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan 2021 memang masih ada deviasi sebesar 1,4 untuk keuangannya.

Dan sisa anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2022 ini adalah sebesar 882 miliar, ini terdiri dari untuk PHLN sebesar 163,38 miliar ini untuk kegiatan ITDP, CSRRP, dan juga ERR, ini karena mungkin terlambatnya persetujuan dan sebagainya.

Rupiah murni sebesar 719 miliar, ini untuk kegiatan-kegiatan untuk IKN ini masih ada tersisa 660,63 miliar, ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, Bapak, untuk yang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa untuk pengadaan lahan, serta konsultasi. Sedangkan yang non IKN ini sebenarnya hanya tersisa 58,47 miliar, ini

disebabkan antara lain karena sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali dan juga adanya paket MYC yang kita relaksasi sampai 2023.

Kemudian, capaian pelaksanaan untuk kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat atau padat karya, Tahun 2022 ini sebesar 99,94% dari total Pagu 2,19 triliun. Ini berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 105.333 orang. Dan, alokasi yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan ini PAMSIMAS misalnya ada di 1.810 lokasi, ini menyerap 35.416 orang. Kemudian juga SANIMAS ini di 1.156 lokasi, ini menyerap tenaganya 28.397 orang. Kemudian, sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan di 1.381 lokasi, ini juga menyerap tenaga kerja 11.059 orang. TPS3R ini di 106 lokasi, ini juga menyerap tenaga 1.992 orang. Kotaku di 312 lokasi, ini juga menyerap 9.412 orang. PISEW itu 450 lokasi, ini juga menyerap 7.635 orang. Serta kontraktual pola padat karya di 528 lokasi, ini telah menyerap sebanyak 11.422 orang.

Bapak-Ibu sekalian,

Untuk kegiatan selain kegiatan IBM, kami juga ada kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2022. *Nah*, 2022 ini hanya dilaksanakan di 17 lokasi, ini juga berdasarkan dari hasil penapisan data *by name, by address* Tahun 2021 dari BKKBN, juga data RTLH, dan juga program BSPS yang ada di 17 lokasi. Ini tersebar di 12 kabupaten kota, 8 provinsi ya, antara lain adalah Aceh, di Aceh itu ada Kabupaten Aceh Utara, Sumatera Utara, ada Kabupaten Asahan, Sumatera Selatan itu ada di Kota Palembang dan Ogan Komering Ilir, kemudian di Bengkulu ini ada di Bengkulu Selatan, Jawa Barat itu di Indramayu, kemudian di Kabupaten Bekasi, di Jawa Tengah itu ada di Pati dan Wonosobo, kemudian di Sulawesi Selatan itu di Kabupaten Jeneponto, sedangkan di Provinsi Maluku, itu di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga di Tual.

Alokasi anggaran fisik sebesar 25,43 miliar, ini untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni atau RTH, juga untuk ini melalui pola integrasi penanganan Ditjen Cipta Karya dan juga Ditjen Perumahan. Dan, ini dilaksanakan secara swakelola dan progres pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem 2022 ini adalah 100% fisiknya dan keuangannya 99,30%.

Kemudian, kalau kita lihat capaian dari program di Cipta Karya masing-masing sektor, air minum ini berupa pembangunan dan peningkatan SPAM untuk 1.283,5 liter/detik dan perluasan sebesar 8.980 sambungan rumah. Ini sanitasi ini berupa pelayanan untuk pengelolaan air limbah domestik untuk 5.072 KK dan juga pelayanan pengelolaan persampahan untuk melayani 38.165 KK. Kemudian, untuk pengembangan kawasan permukiman ini kegiatannya adalah berupa penanganan permukiman kumuh di 2.369 hektar dan juga penataan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya di 36,22 hektar.

Untuk kegiatan penyelenggaraan gedung dan penataan gedung, ini sebesar 105.980 meter persegi dan juga penataan lingkungan sebanyak 20 kawasan. Sedangkan, untuk kegiatan prasarana strategis ini berupa prasarana

pendidikan sebanyak 573 unit dan juga prasarana pasar sebesar 7 unit. Dan, pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Cipta Karya ini juga sudah melaksanakan 9 agenda prioritas, yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan untuk acara internasional, ini ada di Bali, DKI Jakarta, NTB, NTT, Jawa Tengah, ya, sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah *output* penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 10 kawasan, serta prasarana olahraga sebanyak 8 unit, antara lain untuk renovasi Taman Mini, revitalisasi VVIP Bandara Ngurah Rai, penataan kawasan konservasi mangrove Tahura di Bali, kemudian juga penataan kawasan Mandalika, peningkatan fasilitas pendukung pariwisata di Loh Buaya, Rinca, dan juga renovasi *venue* untuk Asian Para Games, di Solo.

Kemudian proyek strategis nasional dan juga direktif penugasan ini ada 12 kegiatan dengan jumlah *output* untuk penyelenggaraan bangunan gedung ini sebesar 16.823,43 meter persegi. Dan, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 3 kawasan, pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.400 liter/detik dan juga layanan pengelolaan sampah sebanyak 68.750 KK. Dan, prasarana pendidikan sebanyak 1 unit dan prasarana pasar sebanyak 1 unit, ya. Ini ada di AMN (Asrama Mahasiswa Nusantara) di Surabaya, kemudian rehab bangunan kawasan Pusaka Benteng Pendem di Ngawi, pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub, di Papua, kemudian juga penataan Kota Pusaka Lasem, di Rembang, kemudian juga pembangunan Keuskupan Merauke, dan juga pembangunan SPAM regional Mebidang, di Sumatera Utara, dan juga pembangunan SPAM regional Kerta Mantul yang tahap 2, peningkatan kapasitas TPA regional Piyungan, TPA Jombang, dan juga pembangunan kampus UII tahap 2, dan juga penataan kawasan Ritual Air Suci di Jumprit ya yang di Temaggung, dan juga untuk rehab pasar sentral Gorontalo, di kota Gorontalo.

Sedangkan, untuk program padat karya tunai ini ada PAMSIMAS, SANIMAS, untuk SPALD-S, kemudian juga SPAL domestik terpadu, Sanitasi LPK, TPS3R, Pisew, dan Kotaku.

Pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas ini juga ada di yang Parapat, kawasan Danau Toba, kemudian Pantai Marina yang ada di Labuan Bajo, dan juga Bukit Pramuka, kemudian penataan Pantai Malalayang dan *ecotourism* di Bunaken, serta Likupang.

Sedangkan, untuk pos lintas batas ini sebanyak ada 5 kegiatan, ini ada dengan jumlah *output* untuk penyelenggaraan penataan bangunan. Kemudian di sini ada 5 kawasan, Serasan, PLBN Serasan, PLBN Sepanjang di Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yetetkun, dan juga PLBN Napan, dan PLBN Jagoi Babang.

Kemudian, untuk pengembangan kawasan industri KIT Batang, ini juga ada pembangunan untuk IPAL, kemudian instalasi pengolahan air, kemudian juga ada instalasi air limbah, kemudian ada pengelolaan sampah terpadu, ini yang juga sudah selesai.

Untuk *food estate*, kami juga mendukung di Sumatera Utara ini ada fasilitas taman sains dan teknologi herbal, hortikultura di TSTH Pollung, ya.

Kemudian untuk IKN kami melaksanakan untuk *land development* tahap 1 dan tahap 2, kemudian *land clearing* untuk area Kantor Presiden, Istana Presiden, kemudian juga lapangan upacara, Kantor Sekretariat Presiden, dan juga bangunan pendukung, serta untuk penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan dan penataan sumbu kebangsaan.

Kemudian untuk rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, kami juga menangani pasca bencana di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian juga pasca penanganan badai siklon, di Seroja NTT, penanganan NTB, dan juga Semeru, dan penanganan gempa di Cianjur.

Di Tahun 2022 juga ini ada beberapa yang telah diresmikan, mungkin kami laporkan juga ada 2 sistem penyediaan air minum yang sudah diresmikan, yaitu di Durolis Riau dan juga SPAM Wae Mese.

Kemudian, ada 5 penataan kawasan yang sudah diresmikan juga, yaitu di kawasan pantai bebas Parapat di Sumatera Utara, di Toba, kawasan Kupang ini penataan Marina, Labuan Bajo, kemudian juga penataan kawasan Gunung Kemukus di Jawa Tengah, kemudian penataan Pantai Malalayang, dan juga *ecotourism* di Bunaken.

Ada 3 sarana pendidikan, yaitu di SDN 3 Nglinduk Grobogan Jawa Tengah, kemudian juga Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah di Jombang, kemudian juga gedung kuliah terpadu Fisipol Kampus Sidotopo Universitas Tidar. Satu prasarana olahraga, yaitu untuk GOR LPK Tanara Banten itu juga sudah diresmikan. Kemudian 3 pasar yang sudah diresmikan, yaitu Pasar Johar di Semarang, Pasar Legi Surakarta, dan Pasar Banyumas.

Kemudian ada 4 bangunan gedung yang sudah diresmikan juga, yaitu Masjid Raya Baiturrahman di Semarang, kemudian VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, asrama mahasiswa nusantara di Surabaya, dan juga menara Masjid Agung di Dharmasraya. Dan, untuk, pengelolaan persampahan ini ada TPA BLE itu di Kabupaten Banyumas dan TPS Warloka di Labuan Bajo.

Dan, Bapak-Ibu sekalian Komisi V DPR RI ini juga telah melakukan kunjungan di beberapa lokasi di Tahun 2022 ini, antara lain di SPAM Regional Bandar Lampung, infrastruktur yang mendukung KTT G20 Bali, dan juga Taman Mini, kemudian di KIT Batang, Ibu Kota Nusantara, dan juga di Itera, serta di TPST Cicukang-Oxbow, ya, dan juga prasarana sanitasi LPK di Lombok Timur.

Dan, perlu kami laporkan juga Bapak Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) kepada penerima hibah atau alih status infrastruktur yang telah terbangun. Dalam hal ini kementerian lain dan juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota ini untuk mengelolanya dalam dua tahap, dan totalnya itu sebesar 15,99 triliun dan mungkin sekarang sudah 16 triliun. Ini Bapak-Ibu sekalian, yang di Tahun 2022.

Sedangkan di Tahun 2023, Bapak Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati. Struktur anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya kalau kita lihat dari pohon anggaran ini memperlihatkan bahwa Pagu di Cipta Karya itu adalah sebesar 25,03 triliun. Rinciannya adalah untuk program dukungan manajemen ini adalah 0,94 triliun ini digunakan untuk pemenuhan wajib berupa gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran, sedangkan untuk perumahan permukiman ini sebesar, program perumahan permukiman sebesar 24,09 triliun, ini terdiri dari rupiah murni 22,01 triliun dan juga PHLN sebesar 2,08 triliun. Kalau rincinya untuk rupiah murni program perumahan permukiman ini sebesar 22,01 triliun ini untuk membiayai fungsi pendidikan, ini sebesar 2,93 triliun, termasuk kegiatan MYC dan juga kegiatan optimalisasi fungsi melalui OPOR. Ini untuk kegiatan air minum, sistem penyediaan air minum dan TPA sebesar 0,23 triliun.

Cadangan darurat dan untuk mobilisasi peralatan tanggap darurat ini hanya 0,10 triliun. Kemudian, kegiatan dengan skema SBSN ini untuk SPAM Jatiluhur sebesar 0,48 triliun. Sedangkan, kegiatan yang infrastruktur berbasis masyarakat, ini sebesar 2,46 triliun, ini terdiri dari alokasi bantuan langsung murni sebesar 2,1 dan *safeguarding*-nya sebesar 0,36. Kemudian, untuk pemenuhan kegiatan direktif, penugasan dan juga pemenuhan RPJMN ini sebesar 15,81 triliun. Dan, di sini termasuk untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar 10,38 triliun.

Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya anggaran tersebut ini kami gunakan untuk memenuhi target program di Tahun 2023. Untuk kegiatan air minum ini berupa pembangunan peningkatan SPAM sebesar 1.963,5 liter per detik dan perluasan, serta optimalisasi sebesar 2.480 sambungan rumah.

Sedangkan, untuk sanitasi ini berupa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebesar 45.623 KK dan pelayanan pengelolaan persampahan ini sebesar 55.011 KK.

Kemudian, untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman, ini berupa penanganan permukiman kumuh secara terpadu di 141 hektar dan juga penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seluas 299 hektar.

Kemudian, kegiatan penyelenggaraan gedung dan juga penataan gedung dan kawasan lingkungan ini ada sebesar 10.750 meter persegi dan di 20 kawasan. Sedangkan, untuk prasarana strategis, yaitu berupa pembangunan dan rehabilitasi, renovasi sarana pendidikan sebesar 1.174 unit, prasarana olahraga 12 unit, prasarana pasar sebesar 25 unit, ini termasuk 11 pasar yang nanti akan dilaksanakan secara MYC sampai dengan Tahun 2024.

Ibu-Bapak sekalian, kalau kita rinci lokasi-lokasinya sebenarnya sudah ada di dalam bahan yang sudah kami sampaikan. Namun demikian, perlu kami sampaikan untuk air minum, untuk pembangunan dan peningkatan SPAM, ini sasaran *output*-nya kami ada di SPAM Pulau Tayando-Tual, SPAM IKK Lotu Nias Utara, Gunung Sitoli, kemudian Sibisa, kemudian juga SPAM mendukung Bakamla, untuk penanganan pasca abrasi Pantai Amurang, kemudian juga

dukungan air minum eks Timor Timur, SPAM Katulampa kemudian untuk mendukung Istana Bogor, SPAM Regional Mebidang, Regional Benteng Kobema, Wososukas, SPAM Mamminasata, dan SPAM KIT Batang, kemudian ada IPA Huntap Tondo Duyu di Palu, kemudian SPAM Bintang Bano, SPAM Tarutung di Tapanuli Utara, SPAM Seropan di Gunung Kidul, dan juga IKK Pangkalan Kerinci Pelalawan, SPAM IKK Tapung Hulu di Kampar, SPAM IKK Muara Tebo, kemudian SPAM Walantaka Serang, kemudian IKK Metebah, IKK Binjai Hulu Kabupaten Sintang, dan juga SPAM Galing, SPAM Ngabang, dan juga IPA serta perpipaian Sepaku mendukung IKN.

Kemudian, untuk perluasan SPAM ini juga kami bangun untuk di transmisi untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur, kemudian jaringan pipa untuk SPAM Regional unggulan ini juga kami lanjutkan di Jawa Timur, Semarang Barat untuk JDU, kemudian juga SPAM Kaligoro Malang, dan juga jaringan perpipaian di Lanud Syamsudin Noor Banjar Baru.

Kemudian untuk *output* optimalisasi, ini ada SPAM di Kuta Buluh, SPAM Air Bangis, kemudian IKK Junjung Sirih, SPAM IKK Cambai, SPAM Regional Durolis, dan Air Seruk, Bumiaram, SPAM UNS, dan SPAM Samigaluh, Jagoi Babang, serta Amfoang Utara, dan SPAM Kaimana.

Kemudian, untuk sanitasi ini juga ada untuk air limbah domestik, ini di Jakarta, antara lain adalah Jakarta *Sewerage Sistem*, untuk Pekanbaru *Wastewater Treatment Plants*, kemudian perpipaian air limbah Kota Jambi Area Barat, perpipaian air limbah zona utara Kota Pekanbaru, air limbah di Palembang, kemudian air limbah Makassar, IPAL Banda Aceh, IPAL Kemayoran, IPAL Batang, kemudian IPAL Duri Bengkalis, dan juga optimalisasi untuk IPLT Maros dan Palopo, IPLT Jugil Lombok Utara, IPLT Samosir, dan pembangunan IPAL untuk mendukung IKN.

Untuk persampahan ini juga kami antara lain kegiatannya adalah untuk alat berat pesisir selatan, TPA Samosir, TPA Regional Kota Manado Minahasa, Minahasa Utara di Bitung, *Solid Waste Treatment* untuk Metro Bandung, TPS RDF untuk Kebon Kongok, kemudian juga perluasan TPA Ijo Balit di Lombok Timur, serta TPS untuk mendukung IKN.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman ini antara lain untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di Muna Barat, peremajaan permukiman kumuh Mrican Sleman, dan juga untuk remajaan kawasan kumuh Belawan Bahari, penataan kawasan *Waterfront* Hulu Kapuas Hulu, dan juga penanganan kawasan Lagasa Kabupaten Muna.

Sedangkan untuk KSPN ini ada *Waterfront City* Pangururan Tele, Pangururan di Danau Toba, untuk penataan Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kaimana, kemudian juga Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, kawasan Dieng, Gedongsongo, Rumah Adat Attakae, dan juga pembangunan IKN.

Untuk bangunan gedung ini ada beberapa, antara lain adalah TSTH Pollung, Mako Paspampres, Hoist Crane Politeknik PU, kemudian juga Baitul

Rahman Sumenep, *eh*, Baitul Arham Sumenep, Graha Pemuda Kompleks Katedral, kemudian juga Sasana Kusuma Bakti Kopassus, AMC Rumah Sakit Anutapura, dan juga gedung DPRD Sulbar, kantin dan parkir DPR RI, serta Lapas Sorong.

Untuk pengembangan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan ini ada di Bike Park Meniting, PLBN di Jagoi Babang dan Long Nawang, kemudian Rumah Betang Lunsia Hilir, kawasan Gagak Handoko, kemudian juga Pura Besakih, Balekambang, Solo, kemudian juga Wisma Negara Tenjoresmi, kawasan religi umat Buddha Jumprit, kemudian Kesultanan Ternate, Kesultanan Buton, area publik Borasi Manokwari, kemudian Krematorium Batam, dan juga revitalisasi Makam Kesultanan untuk di Pontianak, pembangunan Ibu Kota Negara, dan serta di sini ada beberapa untuk bangunan pusat pemerintahan Kemenko dan Kemensekneg.

Kemudian prasarana strategis ini juga perbaikan reinhab dan renovasi sekolah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pembangunan rehabilitasi PTN, PTKIN, ini juga ada beberapa misalnya GIK di UGM.

KETUA RAPAT:

Bu Dirjen, kan ini sudah dibagi sama Anggota juga, mungkin disingkat-singkat saja, Bu Dirjen.

Terima kasih.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, saya pikir ini sudah ada, kami lanjut saja terkait dengan IBM, ya. Infrastruktur Berbasis Masyarakat tadi kami juga sudah sampaikan sebesar 2,1 triliun itu PAMSIMAS, di 1.063 desa, kemudian SANIMAS di 1.890 lokasi, kemudian untuk sarana pendidikan keagamaan di 1.550 lokasi, TPS3R di 307 lokasi, dan Pisew 1.340 kecamatan, dan kemiskinan ekstrem di 70 lokasi.

Kami informasikan, Bapak, bahwa SK penetapan lokasi tahap 1 ini kami perkirakan di akhir Januari ini sudah kami tetapkan, di tandatangani oleh Bapak Menteri dan bagi Bapak-Ibu seluruhnya yang belum menyampaikan, ini kami seluruh usulan ini kami harapkan selambat-lambatnya bulan Februari. Mohon izin Februari agar kami juga tidak terlambat untuk melakukannya dan kami harus melakukan verifikasi di lapangan.

Dan, Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor 1040, tanggal 9 Desember 2022, ini terkait dengan *automatic adjustment*, belanja Ditjen Cipta Karya yang dikenakan blokir sebesar 1,5 triliun. Ini bersumber dari dana rupiah murni dan kegiatan yang kita blokir adalah kegiatan swakelola, perjalanan dinas, serta relaksasi kegiatan tahun jamak.

Kemudian untuk lelang, proses lelang ini juga sebanyak 604 paket dan kami saat ini sudah melakukan pelelangan. Dan, kami mohon nanti segera kita lakukan untuk selain kegiatan reguler ada 39 paket IKN. Dan, 565 paket ini juga terdapat 447 paket kegiatan yang belum tayang. *Nah*, mudah-mudahan nanti Januari 126 paket tayang, Februari 156, Maret 97, dan setelah Maret mungkin 68 paket.

Mungkin demikian, Bapak, dan mohon izin hari ini kami juga mengundang juga seluruh Kabalai, Bapak, yang hadir melalui zoom ya, virtual ini juga sudah hadir semuanya, ada beberapa Kabalai yang baru, yaitu di Jogjakarta itu, Pak Joni, kemudian yang di Bangka Belitung itu Pak Dendi, kemudian yang di Bengkulu itu Pak Dibyo, ya itu Balai-Balai yang baru.

Mungkin demikian Bapak-Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon arahannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Dirjen. Pak Dirjen Pembiayaan, singkat-singkat saja ya, Pak, ya, yang penting.

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. TRISAPUTRA ZUNA, S.E., M.T.):

Baik.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Dirjen Bina Marga,
Dirjen Cipta Karya,
Kepala BPIW,
Serta hadirin yang saya hormati,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Izinkan kami menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022. Pada Tahun 2022 anggaran untuk DJPI adalah sebesar 773,21 miliar, mengalami peningkatan dari semula sebesar 178,16 miliar, utamanya adalah yang berasal dari *loan world bank* untuk penyediaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 mencapai 676,2 miliar atau 85,31%. *Nah*, ini memang paling kecil di antara *unor* yang lain, penyebabnya terutama adalah penyaluran BP2BT dari yang seharusnya sebanyak 13.672 unit yang bisa disalurkan hanya sebesar 11.886 unit atau 86,93%. *Nah*, penyebabnya

antara lain nasabah yang apa, ditolak karena BI *checking* maupun sudah terikat dengan pinjaman yang lain.

Realisasi pembiayaan perumahan untuk Tahun 2022, FLPP mencapai 226.000 unit atau 100% dari yang dianggarkan. Kemudian SSB mencapai 2,57 triliun, kemudian SBUM sebanyak 225.987 unit, serta BP2BT sebanyak 11.886 unit.

Progres KPBU untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut, tahap penyiapan di sektor jalan dan jembatan disusun untuk Suramadu dibanding dengan nanti jalan tol *share*, kemudian disiapkan juga jalan akses *exit* tol, jalan tol Cilacap-Jogyakarta, jalan tol Demak-Tuban, dan lainnya.

Untuk sektor sumber daya air, daerah irigasi di Colo, Bendungan Merangin di Jambi, Bendungan Bodri di Jawa Tengah, daerah irigasi Komering di Sumatera Selatan, serta HLD di Lombok. Selain itu, ada PLTA sebesar 40 megawatt pada Bendungan Tiga Dihaji.

Sektor perumahan disiapkan sebanyak 4 rusun, yang pertama Rusun Kerawang Spoor, Rusun Cisaranten di Bandung, Rusun Sewa terintegrasi Sei Mangkei, dan Rusun untuk ASN di KIPP IKN.

Untuk sektor permukiman umumnya pendampingan SPAM di daerah-daerah yang membutuhkan, ya. *Nah*, selain itu juga ada beberapa penyiapan transaksi KPBU untuk jalan, antara lain jalan tol trans Papua, ruas Jayapura-Wamena, segmen Mamberamo-Elelim yang saat ini dalam proses PQ, kemudian jalan tol Bogor-Serpong via Parung, jalan tol Sentul Selatan-Karawang, dan jalan tol Kediri-Tulungagung.

Untuk sektor sumber daya air adalah PLTM Bintang Bano di NTB dan sektor permukiman pendampingan transaksi SPAM Hilir, DKI Jakarta, dan pendampingan SPAM Rajeg di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya, program kerja Tahun 2023 dari kebutuhan anggaran 382,4 triliun, teralokasi sebesar 165,9 miliar, maaf kami koreksi tadi, Pak, kebutuhannya 382 miliar yang teralokasinya sebanyak 165,9 miliar. *Nah*, dana tadi digunakan untuk penyiapan dan, penyiapan transaksi KPBU serta untuk selain itu juga untuk bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP sebanyak 220.000 unit, subsidi uang muka sebagai pendamping FLPP sejumlah yang sama, kemudian juga tabungan perumahan rakyat sebanyak 12.000 unit.

Bapak Pimpinan Komisi V dan Anggota yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen.
Kepala BPIW, silakan, Pak.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.*

Yang kami hormati dan kami banggakan Pimpinan Komisi V DPR RI, Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI, rekan-rekan pejabat tinggi madya yang secara bersamaan hadir pada acara RDP ini, Bapak Dirjen Bina Marga, Ibu Dirjen Cipta Karya, dan Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, serta seluruh yang hadir pada acara RDP baik secara langsung maupun virtual.

Izinkan saya selaku Kepala BPIW melaporkan terkait dengan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, serta program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Yang pertama, terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Anggaran 2022, bahwa pada Tahun 2022 BPIW mendapatkan amanah alokasi sebesar Rp226,62 miliar. Alokasi ini untuk mendukung dua tugas utama terkait dengan dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp69,45 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp157,17 miliar.

Alokasi mendukung tugas pengembangan infrastruktur wilayah bersumber dari rupiah murni sebesar Rp54,1 miliar dan PHLN sebesar Rp102,76 miliar. Pemanfaatan alokasi rupiah murni digunakan untuk mendukung sekurang-kurangnya 5 tugas BPIW sebagaimana arahan Bapak Menteri, yaitu terkait dengan sinkronisasi program, kemudian monitoring evaluasi, kemudian penyiapan dokumen perencanaan atau RPP provinsi, dan penyiapan kebijakan strategi melalui *review* renstra, dan penyiapan *input* kebijakan strategis bagi Pimpinan.

Pemanfaatan alokasi pinjaman hibah luar negeri digunakan untuk mendukung kegiatan *integrated tourism development project* sebesar Rp73,13 miliar dan *national urban development project* sebesar Rp29 miliar. Komposisi Pagu BPIW pada Tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp29,07 miliar dan belanja barang sebesar Rp194,98 miliar, dan belanja modal sebesar Rp2,5 miliar.

Pada akhir 2022 realisasi BPIW adalah sebesar 83,49% dengan realisasi keuangan sebesar Rp187,13 miliar yang terdiri dari Rp122,94 miliar atau 99,26% dari rupiah murni dan Rp64,19 miliar atau 62,46% pada kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri.

Rendahnya progres penyerapan secara keseluruhan di BPIW dikarenakan adanya kegiatan pinjaman hibah luar negeri yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, di mana untuk ITDP adalah sebesar 89,58% dan 87,78% untuk kegiatan-kegiatan di ITDP. Sedangkan, untuk proyek NUDP belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pembahasan restrukturisasi dengan Kementerian Keuangan, sehingga realisasi fisik dan keuangannya masih 0%. Proses restrukturisasi ini telah dibahas bersama Kementerian PPN/Bappenas yang ditindaklanjuti dengan penyampaian *ekplanatory notes* melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR ke Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada November 2022.

Adapun capaian strategis BPIW Tahun Anggaran 2022, yang pertama adalah capaian penanganan kawasan Tahun Anggaran 2022 dari 249 kawasan kami sudah mencapai 246 kawasan, 3 kawasan akan kami laksanakan pada Tahun 2023 nanti. Kemudian juga BPIW telah menangani beberapa kawasan prioritas melalui penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR terpadu berbasis wilayah, antara lain di DPP Baru Padang Bukittinggi, kemudian di KSPN Sambas-Singkawang, KSPN Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian kawasan rawan bencana Pulau Sumbawa, daerah tertinggal di Kepulauan Maluku, dan lain-lain.

Kemudian, terkait yang kedua adalah penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Pada Tahun 2022 BPIW telah menuntaskan rencana pengembangan infrastruktur wilayah provinsi, RPIW ini merupakan implementasi Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. RPIW berbasis provinsi dan akan dijadikan acuan bagi perencanaan infrastruktur PUPR 10 tahun ke depan. RPIW ini juga akan menjadi salah satu *input* bagi Kementerian PUPR untuk penyusunan RPJP dan juga RPJMN Tahun 2025-2029 bersama Bappenas.

RPIW ini disusun dengan tujuan untuk menterpadukan dan mensinkronisasikan kebijakan spasial apakah itu RTRWN atau RTR Pulau dan RTR provinsi, kabupaten, maupun kota. Dan, rencana sektor di tingkat nasional pada periode pertumbuhan dengan koridor pemerataan apakah itu kawasan maupun antar kawasan. RPIW Tahun 2023-2029 telah selesai disusun dan juga telah dilakukan pembahasan dengan unit organisasi internal di Kementerian PUPR apakah itu dari Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Muatan RPIW ini meliputi informasi tentang arah kebijakan, profil, dan potensi setiap wilayah berikut profil dan kinerja infrastruktur sebagai *baseline* perencanaan ke depan, identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis setiap wilayah perencanaan, perkiraan, skenario pengembangan wilayah, dan implikasi terhadap kebutuhan dukungan infrastruktur yang disesuaikan dengan skenario pengembangan wilayahnya, dan rumusan rencana aksi pembangunan infrastruktur dalam kerangka waktu 2023-2029 yang

disesuaikan dengan kerangka waktu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tautan untuk dukungan RPIW bisa di-*download* oleh Bapak-Ibu melalui tenaga ahlinya pada sebagaimana terkait dalam tayangan dan juga beberapa dokumentasi terkait pembahasan RPIW secara internal Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah juga kami sampaikan dokumentasinya.

Kemudian, berikutnya adalah 2022 telah kita laksanakan Rakorbangwil, selain penyusunan RPIW berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022, BPIW juga diamanahkan untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau Rakorbangwil setiap tahun pada bulan Oktober. Rakorbangwil adalah forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi.

Rakorbangwil diselenggarakan oleh BPIW pada bulan Oktober atau T-2 tahun perencanaan dengan melibatkan Sekretariat Jenderal, unit organisasi teknis, Kementerian/Lembaga terkait, dan pemerintah daerah provinsi terkait. Rakorbangwil menghasilkan kesepakatan program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan, yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya dari BPIW, unor teknis, Kementerian/Lembaga lain dan Bappeda. Program keterpaduan menjadi acuan bagi *unor* teknis dalam melakukan penyusunan bahan pembahasan konsultasi regional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

Pembahasan dalam Rakorbangwil difokuskan pada upaya untuk menyepakati kawasan-kawasan strategis nasional yang diprioritaskan untuk ditangani bersama oleh Kementerian/Lembaga dan kesepakatan ini menjadi dasar bagi BPIW untuk mengawal dukungan kebutuhan program, dukungan infrastruktur PUPR pada pembahasan-pembahasan program selanjutnya.

Selain pembahasan cukup intensif melalui mekanisme pembahasan *desk*, pelaksanaan Rakorbangwil ini juga diawali dengan pembahasan koridor-koridor pengembangan wilayah sesuai dengan isu strategis yang berkembang dan akan berkembang. Pembahasan koridor pengembangan wilayah ini melibatkan menteri-menteri terkait dan pakar-pakar dari akademisi atau praktisi. Selanjutnya, atas dasar hal tersebut Bapak Menteri PUPR memberikan arahan strategis yang menjadi acuan bagi semua pihak dalam pembahasan di setiap provinsi sebagaimana dokumen terlampir di dalam *slide* yang kami sampaikan.

Kemudian yang terakhir terkait dengan capaian 2022, yaitu tugas dari Bapak Menteri PUPR kepada BPIW untuk melaksanakan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR. Pada Tahun Anggaran 2022, BPIW juga melaksanakan kegiatan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* di Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, antara lain dengan melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan program dan

anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan, serta memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau bangunan rumah baru, serta relokasi permukiman.

Perpres 72 Tahun 2021 juga mengamanatkan untuk percepatan penurunan *stunting*, di mana Kementerian PUPR merupakan Anggota tim percepatan penurunan *stunting* bersama dengan 7 menteri lainnya, dengan indikator sasaran dalam strategis nasional adalah percepatan penurunan *stunting* sebesar 90%, presentase desa atau keluaran stop BAB sembarangan pada Tahun 2024.

Terkait kesamaan data yang digunakan dalam kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem ini Bapak Presiden telah mengarahkan untuk menggunakan data berdasarkan nama dan alamat atau *by name by address*, sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat. Arahan tersebut diturunkan dalam Kemenko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di mana pada diktum kedua dan ketiga dijelaskan bahwa sumber data adalah data pendataan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Beserta pemutakhirannya yang telah di peringkat berdasarkan informasi kesejahteraan dengan rincian informasi keluarga dan individu dengan nama dan alamat atau *by name by address*.

Berdasarkan data ini BPIW berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan telah melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memeriksa adanya kekeliruan data. Sampai dengan akhir Tahun 2022 penanganan kemiskinan ekstrem telah mencapai 117 kabupaten kota dari target 212 kabupaten kota di 21 provinsi dari target 25 provinsi.

Berikutnya adalah terkait dengan program kerja Tahun Anggaran 2023. Jadi, berdasarkan tema RKP Tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian PUPR melaksanakan prioritas nasional 2 dan prioritas nasional 5 pada prioritas nasional.

Kemudian, berdasarkan tema tersebut BPIW menyusun program kerja di Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp140,76 miliar termasuk alokasi untuk kegiatan yang didanai pinjaman luar negeri sebesar Rp16,56 miliar, yaitu *kegiatan Indonesia tourism development program* dan *national urban development project*.

Postur Anggaran BPIW di Tahun Anggaran 2023 terdiri dari kegiatan dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp74,8 miliar, termasuk belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, pelayanan dukungan manajemen, serta dukungan dan kebutuhan internal. Kemudian terdapat kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp65,96 miliar yang terdiri dari sinkronisasi program, monitoring dan evaluasi,

penyusunan dokumen rencana, penyusunan kebijakan dan strategi, serta termasuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

Pada Tahun 2023 juga, BPIW akan melengkapi RPIW provinsi yang akan disusun dengan melakukan penajaman pada kawasan-kawasan prioritas, antara lain Jepara, Kaba Tanjung, Pulau Selaru di Maluku, KSPN Taman Nasional Kerinci Seblat, Pulau Madura, kawasan Bolaang Mongondow, dan kawasan-kawasan prioritas lainnya.

Terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* pada Tahun 2023 direncanakan seluruh 514 kabupaten kota menjadi prioritas. Kementerian PUPR melalui BPIW telah melakukan pengelolaan data P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk menentukan lokasi-lokasi prioritas penanganan pada 514 kabupaten kota. Di mana lokus prioritas merupakan lokus sampai dengan level RT, RW, dusun, ataupun desa yang memiliki penduduk miskin ekstrem dan RTLH terklaster lebih dari 15 unit atau minimal 15 unit.

Pada 288 kabupaten kota Dapil Komisi V terdapat total 254.178 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang teridentifikasi yang sudah disampaikan kepada tenaga ahli Komisi V DPR RI pada acara rapat sinkronisasi program dan data usulan bantuan pembangunan dan penyediaan perumahan bersama tenaga ahli Komisi V, pada tanggal 9 September 2022. Tautan rekapitulasi RTLH untuk seluruh Anggota Komisi V dapat diakses melalui tautan sebagaimana ada di dalam tayangan kami.

Demikian, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota sekalian, yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi kegiatan 2022 dan program untuk 2023 dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Kepala BPIW.
Sebelum ke Anggota ada apa namanya, penyampaikan dari Pak Ketua.
Silakan, Pak Ketua.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Ridwan.

Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW, dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur,

Saya ke Dirjen Bina Marga, Pak, Pak Hedy Rahardian, ini di-*slide* nomor 5, Pak, bahan paparan Dirjen Bina Marga. Pagu akhir Ditjen Bina Marga adalah sebesar 58,14 triliun, namun pada bahan paparan Menteri PUPR tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, Pagu APBN Tahun 2022 Ditjen Bina Marga adalah sebesar 50,2 triliun, dengan demikian terdapat selisih sekitar 8 triliun. Ini mohon

penjelasan dulu *nih*, Pak, ini yang mana yang benar ini. Sebenarnya kemarin di paparan Pak Menteri pun ada selisih sebetulnya ya dari rapat kita terakhir ya, tapi khusus case ini, Pak, mungkin perlu dijelaskan ke kami ini, di mana letak *anu-nya* ini.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Ini karena ada ini, Pak Ketua, ada pencatatan ELMAN, Pak, jadi mereka itu dicatatnya di kita, Pak, asetnya itu. Pengadaan tanah itu, jadi itu memang hanya buku saja sehingga di akhir tahun pasti kita akan ada tambahan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh ELMAN untuk pengadaan tanah, Pak. Jadi, ini memang di ujung seperti tahun kemarin, Pak Ketua. Jadi, ini memang pencatatan aset saja sebenarnya, akhirnya dijadikan masuk ke anggaran kita di ujung.

Itu mungkin, Pak Ketua.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, terima kasih, kalau itu jelas.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Roberth juga.
Silakan, Pak Roberth, Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,

Teman-teman saya kira kita sebelum masuk ke Anggota kita semua, saya ingin kita *break* dulu, kita *break* makan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita berdiskusi di sana dengan mitra. Jadi, supaya kita nanti masuk itu lebih enak lagi ke depan, karena tadi saya dapat info bahwa teman-teman Dirjen ini akan menemani Bapak Menteri ya dengan BPK. Kalau kita lihat waktunya sampai jam 2, saya kira ini yang bertanya banyak sekali ya. Jadi, saya kira kita lebih fokus nanti di masuk nanti sebelum itu kita beli makan dulu. Gimana teman-teman? Saya usulkan ini.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, usul Pak Roberth, artinya kan tadi jam 2 mereka para Dirjen dan Kepala BPIW ini harus mendampingi Pak Menteri dalam suatu acara. Ada usul Pak Roberth barangkali ini jauh lebih bagus kita makan sama-sama dulu sambil kita ngobrol, setelah itu kita masuk kembali ke dalam sini. Mudah-mudahan semuanya bisa ada kesepakatan gitu.

Bisa setuju ya, Pak, ya? Baik, kalau begitu rapat kita skor selama satu jam ya, atau sampai setengah satu ya, 12.30 atau kelamaan, sampai jam 12 ya, ya kita *skors* sampai jam 12.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.30 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 12.30 WIB)

3 Dirjen dan 1 Kepala BPIW. Namun demikian, sampailah sekarang pada pertanyaan para Anggota yang terhormat. Tetapi dengan diskusi kita baru-baru di meja makan saya pikir diskusi itu cukup memberi warna yang bagus dan bisa kita bisa segera kita lakukan. Tapi satu ada yang permintaan khusus dan kita berikan kepada Bu Sri Rahayu ingin menyampaikan pandangannya.

Silakan, silakan, Bu Sri, saya yang kasih khusus saya.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi V, Pak Dirjen Bina Marga, Bu Dirjen, Bapak dari BPIW, maupun Pembiayaan.

Saya sederhana saja, Pak, yang pertama terkait dengan pengentasan penanganan integrasi kemiskinan ekstrem dan *stunting*. Bu Diana, saya izin untuk program Tahun 2023 khususnya BSPS itu kan sebagian besar yang saya lihat pembangunannya itu mungkin disampaikan juga selain ada standar, ada disampaikan kepada pendamping bahwa pembangunan itu tolong diharuskan untuk ada kamar mandi atau toilet, karena ini menjadi salah satu penyebab dari *stunting* itu sendiri. *Nah*, sebagian besar mereka justru mengutamakan kamar, kemudian ruang keluarga, dan kamar mandi maupun dapur *tuh* dianggap sesuatu yang tidak penting, kalau dapur oke lah ya tapi kalau kamar mandi menurut saya. Oleh karena itu, mohon untuk itu dibuatkan standarnya supaya betul-betul apa yang diminta apa penanganan kemiskinan dan *stunting* ini betul-betul bisa terlaksana.

Kemudian yang kedua, Ibu Diana, ini termasuk dari Pak, Pembiayaan Infrastruktur ya. Yang kedua dari Pembiayaan, Pak, apakah pembiayaan ini kan hanya menganggarkan untuk koordinasi dan seterusnya sebagian besar ya. Saya mohon apakah di dalam perencanaan dengan provinsi itu ada juga keterkaitannya dengan RT, RW yang ada di wilayah tersebut. Karena saya khawatir ya, Pak, ya RT, RW ini selalu hanya menyesuaikan saja begitu. Barangnya sudah ada kemudian disesuaikan dan seterusnya. *Nah*, ini apakah ada keterkaitannya ataukah ada komunikasi untuk ini supaya pembangunan ini juga sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.

Bu Diana, masih ketinggalan satu, pembangunan yang dilaksanakan ini kan cukup besar ya, Bu Diana, ya, termasuk kawasan Mandalika dan seterusnya, kawasan-kawasan yang lain. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan pembangunan yang besarlah, spektakulerlah ya. Lalu adakah semacam apa perencanaan atau program ke depan ini seperti apa pembiayaannya, pemeliharannya. Karena seperti Mandalika ini kan tidak selalu digunakan setiap saat sehingga ada pemasukan. *Nah*, ini kalau tidak yang lain, yang lain pun juga akan demikian. Termasuk di dalamnya mungkin keterlibatan kita semua di PUPR ini adalah dengan membangun *food estate*. *Nah*, *food estate* ini kan kemarin juga saya sampaikan sebagian besar juga ada yang, ada yang jalan, ada yang *nggak*, ada yang berulang, dan seterusnya. Lalu bagaimana perencanaan ke depannya untuk anggaran-anggaran semacam ini. Saya khawatir kalau hal ini hanya sekedar kemudian setelah itu tidak ada kelanjutannya dan akan menjadi program spektakuler tetapi mangkrak, karena banyak bangunan-bangunan yang memang dikerjakan oleh PUPR ini. Saya kira itu.

Terima kasih, Pak Ridwan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam

Terima kasih, Bu Sri.
Pak Ketua terakhir, silakan, Pak Ketua, sudah selesai, Pak.

Atau masih ada yang bertanya Anggota? *Oh*, belum cukup tadi di dalam?

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Tadi, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Pak Bakri, silakan.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Baik, terima kasih, singkat saja.

Pimpinan yang saya hormati, Pak Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, BPIW, dan tentunya semuanya,

Saya cuma *pingin* mendengar ini sedikit ada kata dari Dirjen Bina Marga sehubungan dengan kunjungan kemarin, kunjungan spesifik, Pak Dirjen, ke Jambi pada tanggal 19 Januari kemarin, ya, 9 Januari kunjungan spesifik dalam rangka melihat kondisi jalan, jalan nasional. Yang kata teman-teman di sana

hampir 200 kilo lebih itu dilintasi angkutan batubara. Setelah dihitung dan dievaluasi oleh kawan-kawan di sana ternyata kalau diperbaiki secara normal itu membutuhkan anggaran 1,2 triliun, 1,2 triliun. *Nah*, sementara PNBPNya itu lebih kurang hampir 600 miliar. Jadi, saya pikir mungkin tekorlah bahasanya. *Nah*, jadi kawan-kawan kemarin sudah ke sana dengan berbagai macam bentuk yang kita lihat mulai dari kendaraan sampai berjejeran apa semua macam-macam. *Nah*, kira-kira *statement* dari Kementerian PUPR terhadap jalan ini apakah ada anggaran khusus juga nanti untuk perbaikan atau memang bagaimana-bagaimana kira-kira. Ini perlu mungkin kami, saya khususnya Dapil sana pingin mengetahui.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bakri.

Yang lain masih ada sekalian? Pas ya, semuanya sudah cukup ya.

Baik, kami persilakan Pak Dirjen menjawab dan kemudian Bu Dirjen, kemudian tadi dari Pak Dirjen Pembiayaan juga ada. Silakan, Pak.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik, terima kasih.

Pak Pimpinan yang kami hormati,

Pak Bakri, ini memang jadi buah simalakama untuk kita ini kalau itu kita katakanlah secara sistem dapat 600 miliar tapi kita harus *pending* 1,2 triliun, ini rugi bandar istilahnya, ini kan susah kita kan. Tentu saja ini kalau pun sekarang dengan apa namanya, kita perbaiki 1,2 triliun jangan-jangan juga *nggak* lama lagi rusak, ini kan bukan solusi gitu. Jadi, kami ingin memang ada jadi begini, Pak, yang namanya jalan itu, itu kan *instrument*, Pak, apa namanya *hardware* dan pasti ada cara menggunakannya. Kalau cara menggunakannya tidak benar ya apapun itu pasti akan cepat rusak.

Jadi, saya kira ini kalau sekarang jalan ini digunakan angkutan batubara yang menurut aturan mestinya batubara itu menggunakan jalan tambang, jalan khusus gitu kan. Karena jalan yang melewati jalan nasional kalau di luar aturan seharusnya ada izin, Pak, ada izin lintas. Jadi kalau kita lihat ada truk, kendaraan bawa trafo PLN itu kan tidak standar, tidak memenuhi standar, pasti mereka minta izin dulu sama kita, bahwa ini ada lewat kendaraannya tidak standar, itu normatifnya begitu. *Nah*, ini ada kendaraan angkutan batubara yang tidak memenuhi standar penggunaan jalan nasional kita dan menimbulkan kerusakan.

Jadi, saya kira sesuai arahan pimpinan sebelumnya, kalau ini cara penggunaan jalannya tidak diperbaiki maka menggunakan uang di situ akan tidak efektif, Pak, akan rusak lagi, rusak lagi. Ya walaupun katakanlah butuh 1,2

triliun tapi penggunaan jalannya benar tentu kita akan carikan uangnya, Pak, walaupun mungkin bertahap. Kita akan carikan, Pak, kita umpamanya bisa lewat SBSN atau apa gitu kan, karena memang jalan sangat penting. Tapi kita mau carikan bagaimana kalau sekarang kondisi penggunaannya seperti ini, ini kami jadi susah mau mengusulkan juga. Jadi, saya mohon bantuan masyarakat terutama pengguna jalan di sana bantuan nanti untuk bagaimana agar kita menertibkan penggunaan jalan, Pak, sehingga kita bisa program kan perbaikannya 200 kilo meter ini kita akan usahakan untuk mulai diperbaiki kalau penggunaannya sudah tertib, Pak Bakri. Demikian mungkin yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin, izin, Pimpinan.
Berkenaan dengan ini, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Kami ikut, kebetulan kunker dan sepanjang jalan saya melihat itu sungai itu sangat dekat, sungai. Artinya ini bukan hanya tugas Bina Marga saja, Pak, ini lebih pada tugas kebersamaan terintegrasi, SDA lebih ini. Saya sudah diskusi dengan teman di Balai Besar Sungai di sana dan itu sangat memungkinkan, hanya 1 kilo, 2 kilo, Pak, dari jalan utama itu, jalan nasional itu, tembus sungai malah ada yang kelihatan sampai 1 kilo. Hanya pasti ada permasalahan saya bilang kenapa orang *nggak* cepat lewat situ, pasti ya pendangkalan, sedimentasi, ada (suara kurang jelas) banyak sekali di situ, jadi ada sedimennya, itu bisa dilakukan.

Kemudian jembatan, Pak, ada satu jembatan (suara kurang jelas) cuma 6 meter, yang lain belasan. Yang lain bisa lewat itu tongkang, tongkangnya diperkecil 3.000 tonlah, kalau 6.000 ya terlalu besar, 3.000 bisa, saya kira itu yang paling cepat. Bagaimana teman-teman di daerah mau tegas, Pak, menyangkut mata pencaharian orang banyak sudah, sudah ribuan, Pak, *nggak* bisa ditertibkan kita. Kalau nertibkan ini banyak yang mengeluh supir-supir apa ini *nggak* ada mata pencaharian lagi. *Nah*, ini jadi simultan pekerjaannya harus, beresin itu jalan khusus melewati sungai, dermaga-dermaga kecil banyakkkan saja, saya kira bisa selesai.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (SUDEWO. S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Dewo, silakan, Pak.

F-P. GERINDRA (SUDEWO. S.T., M.T.):

Kali ini kami rapat dengan Kementerian PUPR yang terkait dengan angkutan batubara di Provinsi Jambi, saya hanya ingin menuntut dari Kementerian PUPR saja. Kementerian PUPR itu punya instrumen kebijakan, yaitu Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2000 atau berapa begitu ya, bahwa jalan nasional itu tidak boleh dilalui oleh angkutan batubara. Saya kira Dirjen Bina Marga tahu persis hal ini, bagaimana menegakkan aturan atau mengimplementasikan aturan ini untuk mengatasi di Jambi. Tapi, saya juga menyadari bahwa *leading sector* untuk mengatasi persoalan itu bukan Kementerian PUPR. Punya permen tapi juga ada aturan-aturan lain yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang dimiliki oleh institusi lain bilamana itu digunakan sesuai kewenangannya. Itu akan lebih memiliki dampak daripada Kementerian PUPR sendiri, jadi saya tidak meminta lebih kepada Kementerian PUPR terhadap hal ini.

Konteksnya, saya tidak menuntut kepada Kementerian PUPR untuk mengatasi tetapi sesuai dengan kewenangan Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap hal yang di mana sesuatu dilakukan satu pelanggaran nyata, pelanggaran nyata, tapi dampaknya terhadap Direktorat Jenderal Bina Marga menjadi beban. Jadi, Bina Marga Kementerian PUPR itu justru menerima dampak dari pelanggaran nyata yang dilakukan oleh institusi-institusi lain. Maka saya minta, saya memberi perkuatan saja kepada Menteri PUPR, kepada Dirjen Bina Marga apa yang di curhatkan oleh Dirjen Bina Marga itu tentu saya dukung, jangan semudah itu mengalokasikan APBN di sana oleh karena itu jelas merupakan satu pelanggaran nyata yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi, walaupun dilakukan alokasi penganggaran itu justru akan memperparah persoalan. Oleh karena apa? Oleh karena angkutan di sana itu justru akan mengalami peningkatan secara signifikan, 11.000 truk.

Saya membaca surat keputusan gubernur saja, kalau *nggak* salah di bulan Oktober Tahun 2022 itu merupakan satu pelanggaran, satu ilegal yang dilegalkan. Tapi saya menyayangkan, sungguh menyayangkan dia membatasi operasional kendaraan angkutan batubara hanya 12 jam. Sementara saya dengan Komisi V, Anggota, kawan, Anggota Komisi V kawan-kawan yang lain yang dipimpin oleh Pak Iwan Aras, itu melihat secara langsung di siang hari lalu lintas di sana itu sangat lengang, sangat lengang, mengapa hanya dibatasi 12 jam. Andaikata memang memberikan satu toleransi, andaikata memang memberi toleransi, tapi yang kita kehendaki kan tidak seperti itu, yang kita kehendaki adalah aturan itu ditegakkan. Tapi *monggo* oleh beberapa institusi untuk mengimplementasikan itu, tapi yang terpenting Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen tadi saya dukung 100%. Supaya selektif betul mengalokasikan preservasi jalan di tempat itu.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Hamka, silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya hormati, Pimpinan,

Menyambung apa yang disampaikan Pak Dewo, kemarin kami meninjau jalan tersebut yang dipimpin oleh Pak Iwan Aras. Saya berkesimpulan bahwa ada proses pembiaran yang terstruktur, tidak ada langkah-langkah teknis untuk mencegah apa yang disampaikan Mas Dewo tadi. Bahkan sebenarnya ada jembatan timbang pun di sana itu tidak difungsikan. Jadi, oleh karena itu, saya kira membuang-buang anggaran saja kalau itu kita pikirkan, harus memikirkan dirinya sendiri di sana dulu, bagaimana proses pembiaran ini dihentikan. Itu tidak masuk di akal.

Di sisi lain jalan nasionalnya jadi ambruk, jalan provinsinya diamankan sedemikian rupa, tumpuannya ke jalan nasional saja. Saya kemarin tidak mau bicara banyak di sana karena ya, ada sesuatu yang tidak tidak *fair* menurut saya. Di sisi lain hanya menuntut perbaikan jalan nasional, di sisi lain tidak ada perbaikan-perbaikan sistem untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata itu melanggar.

Saya kira itu saja tambahan saya Pak Dirjen, saya sependapat dan kalau bisa kita tidak usah pikirkan dulu yang di sana sampai merubah sikapnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.

Pak Iwan, silakan, Pak Iwan, kebetulan beliau yang pimpin ini.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Hanya melengkapi mungkin, Pak, apa yang disampaikan teman-teman tadi kurang lebih kebijakan kami, saran kami, rekomendasi kami ke PUPR seperti apa yang telah di sampaikan tadi. Namun, yang perlu mungkin kita lakukan adalah koordinasi yang efektif dengan *stakeholder-stakeholder* yang

lain. Dalam hal ini tentunya Kakorlantas dan Pemprov setempat dan pemerintah daerah setempat agar supaya Undang-Undang Jalan ini betul-betul dapat diimplementasikan dengan baik. Karena kita melihat berdasarkan data yang diberikan oleh wakil gubernur kurang lebih 10.600 truk, Pak. Kalau satu truknya itu panjangnya 5 meter saja berarti kalau dijejer mobil itu kurang lebih 50 kilo meter di sepanjang jalan. *Nah*, ini tentunya memang menjadi PR buat kita bersama, tapi saya dari Komisi V tentunya tidak akan masuk ke wilayah persoalan tambang dan lain sebagainya, tetapi kita lebih menitikberatkan kepada penggunaan jalan nasional. Ya, mungkin kita domain kita berada di proses jalan nasionalnya, persoalan itu tambang ataupun sawit itu urusan dari tentunya institusi yang lain. Tetapi dalam hal penertiban penggunaan jalan nasional saya meminta ada tindakan yang konkret dari Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga ataupun Balai Besar atau Balai kecil Jalan setempat agar supaya hal tersebut betul-betul bisa diindahkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Jalan ini.

Jadi kita tidak usah berdebat kusir persoalan tambang ini tutup atau gimana, karena saya kira aturan-aturan terhadap tambang itu sudah jelas seperti apa, mereka harus membuat jalan khusus tidak melalui jalan nasional kita. Jadi mungkin *bargaining* dari Kementerian PUPR bahwa kita tidak tentunya akan mengalokasikan anggaran yang optimal di jalan nasional itu sepanjang penggunaan jalan tersebut tidak sebagaimana mestinya dalam aturan yang ada. Mungkin begitu, Ketua.

Terima kasih waktunya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Iwan Aras.
Pak Ketua, silakan, Pak Ketua.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.)

Pak Ketua.

KETUA KOMISI V DPR RI (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Sebentar, Pak, ya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.)

Tadi saya.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebentar, sebentar.

Menyambung ini kalau menurut saya Pak Hedy Rahadian, Pak Dirjen, kan ini soal penegakan hukum kalau saya baca ini. *Nah*, ada yang tidak taat asas, ada yang tidak taat hukum. Kan tambang kan bukan hanya ada di Jambi,

Pak, di seluruh Indonesia ini ikan ada perusahaan tambang, *kok* yang rebut cuma di Jambi, kan gitu. *Nah*, setelah saya dengar dari penjelasan teman-teman rupanya tambang ini tidak mau bikin jalan, Pak, dia mau pakai jalan nasional saja. Di aturan tidak boleh, dia harus pakai jalan khusus. Bukan, sekarang gini, Pak, kalau kita perbaiki jalannya pun terus kapasitas yang lewat seperti itu ya *sami mawon*, Pak. Ini sama dengan kita bicara Pantura ini, kita terkait dengan ODOL, sama ini ya bahkan lebih parah kalau menurut saya.

Oleh karenanya, kalau menurut saya, Pak Dirjen, kalau pun ini diperbaiki bukan dalam rangka memperbaiki jalan ini dengan kondisi masih seperti ini. Kita perbaiki jalan ini dengan kondisi yang berbeda, Pak, sehingga setelah diperbaiki jalan ini jadi baik. Kalau kondisinya seperti ini diperbaiki tidak membuat jalan ini menjadi baik, Pak, yang ada duit kita habis seperti membakar uang kita di situ. Jadi, kalau menurut saya ini, Pak Bakri kita urun rembuk ini pendapat ya, pendapat urun rembuk.

Ada idiom hukum bilang, Pak, “biar pun langit runtuh hukum harus ditegakkan”, gitu *loh*. Tadi, Pak Eddy Santana bilang ada sekian banyak orang cari makan di situ, pasti, Pak. Tapi kalau ini semua melanggar hukum dan kita biarkan *nggak* ada jalan keluar, Pak, kalau menurut saya ini. Perbaiki jalannya ya kondisinya seperti itu, tonasenya bagaimana, di samping tonase jumlahnya bagaimana? Menurut saya bukan solusi, solusinya adalah jalan khusus, kan gitu solusinya jalan khusus, makanya di Undang-Undang Jalan kita bikin. Kurang besar apa tambang di Kaltim, Pak, kurang besar apa tambang di Kalimantan Selatan dibanding Jambi, saya rasa lebih besar Kaltim sana, tapi di sana pakai jalan khusus tidak pakai jalan umum. Di Kalsel tempo hari pakai jalan umum ditutup sama gubernur, Pak, jalan umumnya *nggak* boleh lewat. Yang *nggak* bisa bikin tambangnya yang ditutup, itu solusi, Pak.

Nah, kalau saya *nggak* ragu-ragu ngomong, Pak, saya bilang tadi terserah mau ditanggapi tapi kita bernegara inikan harus taat asas, maka negara ini ada undang-undang, ada aturan. Undang-Undang Jalan Komisi V yang bikin, Ketua Panjanya Pak Ridwan, kita semua ada di sampingnya berhari-hari, bermalam-malam, jelas pasal, ayatnya, Pak, jelas saya masih ingat. Bahwa ada yang namanya jalan khusus untuk kasus yang seperti ini, tidak boleh pakai jalan umum. *Nah*, hanya memang kalau penerapannya saya setuju tadi pendapat Pak Eddy Santana itu *gitu loh*, setuju itu saya ada sungai tidak jauh dari situ bagaimana sungainya, tapi kan bukan tugas Pak Hedy Rahadian, bukan tugas Dirjen Bina Marga soal itu.

Jadi, kalau menurut saya, ya, jalan keluaranya perusahaan tambang itu harus membuat jalan khusus, itu jalan keluaranya titik, *nggak* ada solusi lain. Cuma dinda Iwan tadi kan yang mimpin sana agak kurang anu bahasanya ya bahasa politisi lah, tapi karena saya *nggak* ikut saya beban moral saya agak kurang mungkin ya, tapi saya harus menyampaikan yang sebenarnya *gitu loh*. Karena ya, makanya orang bilang kalau kita *nggak* jujur masalah *nggak* pernah selesai, jadi berusaha jujurilah dengan masalah itu biar persoalannya selesai.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ketua.
Pak Willem terakhir ya, Pak Willem terakhir, pendek-pendek Pak Willem ya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.)

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Rekan-rekan Bapak-Ibu Anggota Komisi V dan juga Dirjen Bina Marga serta seluruh jajarannya,

Dari kami sedikit saja terkait dengan jalan ruas nasional, hancurnya luar biasa cukup lama sampai hingga hari ini belum ada perhatian. Memang ada perhatian tapi baru sampai di Puncak Mega dari Wamena. Dari dari Wamena-Ilaga-Ilumulia itu belum, karena ini ruas jalan nasional dan ruas ini paling aman tidak pernah ada konflik. Mengapa? Karena memang dipengaruhi oleh kendaraan-kendaraan besar dengan muatan yang melebihi kapasitas jalan. Oleh karena itu, mohon diperhatikan supaya bisa dibatasi, apakah mungkin harus bangun jembatan timbang di Wamena seperti itu dan jalan ini perlu ada peningkatan.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Dirjen.
Tetapi khusus yang Jambi tadi *ndak* usah dijawab karena sudah dipertegas oleh Pak Ketua tadi ya.

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.COMN&MEDIASST.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi?

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.COMN&MEDIASST.):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Bu.

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.COMN&MEDIASST.):

Pak Dirjen, karena ini tadi membahas mengenai tambang dan juga jalan. Saya hanya ingin menambahkan itu di Weda di Halteng itu tentu saya sepakat dengan apa namanya yang diutarakan oleh Pimpinan, bahwa tiada jalan lain selain perusahaan tambang itu menggunakan jalan khusus. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah karena memang di Halteng penambahan jumlah pegawai tambangnya sangat besar sehingga jalan nasional yang dipakai itu menjadi sangat macet dan cepat rusak. *Nah*, ini prosentase kecelakaan juga sudah menelan korban jiwa yang sangat banyak. *Nah*, untuk itu saya mohon perhatian dan juga solusi khusus untuk yang di Halteng itu hanya itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu.
Silahkan, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya kira, Pak, saya sedikit komentari yang Jambi. Intinya kami akan mendukung upaya mencari solusi, Pak, tapi tentu saja tidak bisa kami sendiri. Umpamanya tadi dengan sungai itu mungkin kita bicara dengan SDA dan juga terutama Kementerian Perhubungan, yang angkutan sungai itu. Dan, saya kira memang jalan khusus juga mungkin salah satu contoh adalah upaya Gubernur Jawa Barat membangun jalan khusus untuk tambang kore Pak, di Bogor, Pak, dan itu saya kira bisa berjalan prosesnya. Barengan gitu ya, mereka bagaimana yang mendapatkan *benefit* ikut di situ.

Itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih untuk saran-sarannya dari Pak Dewo. Saya kira itu betul memang kami saat ini belum punya kewenangan *enforcement* yang cukup kalau di Bina Marga.

Kemudian yang Wamena-Ilaga kita catat, Pak, tapi memang kita sekarang ingin fokus menyelesaikan jalur logistik dari Depapre atau Jayapura ke Wamena, agar harga di Wamena cepat turun, Pak, itu tujuan utama kami untuk fokus menurunkan biaya di Wamena. Tapi itu akan kami lihat nanti masalah Wamena-Ilaga tadi yang disampaikan Bapak.

Yang Halmahera Tengah memang sudah menjadi perhatian kami, Bu, dan balai sudah melakukan pembicaraan dengan perusahaan, agar perusahaan melalui CSR-nya ikut menyelesaikan masalah di situ.

Terima kasih, Pak Ketua.

F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAHALKADRIE, S.H., M.H.):

Pak Ketua, saya bisa sedikit, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAHALKADRIE, S.H., M.H.):

Sedikit saran saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, ingat waktu sudah mau hampir jam 2.

F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAHALKADRIE, S.H., M.H.):

Memang ini Pak Dirjen, ini memang persoalan yang cukup berat. Saya kira di mana-mana terutama berkaitan dengan sumber daya alam sekarang yang dipakai. Tapi mungkin juga inikan tidak bisa cuma hanya di Kementerian PU. Mungkin hasil rapat ini juga merupakan yang harus dibawa, paling tidak harus duduk ini Menteri SDM-nya sendiri karena semua izin sekarang inikan larinya ke pusat, pemerintah daerah dalam hal inikan tidak berhak untuk mengeluarkan izin. Maka mungkin saya kira Menteri PU, Menteri SDM, dan Menteri Perhubungan ini harus duduk ini, Pak, berkaitan dengan ini supaya ini tidak menjadi hal-hal yang terus berlanjut.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masalah Jambi saya kira sudah jelas tadi sudah di. Ya, ada tambahan dari Pak Andi Iwan Aras, silakan.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) - WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Ketua.

Saya sedikit agak malu tadi mendengar pernyataan Pak Lasarus, bahwa komisi ke Jambi kemarin dipimpin oleh saya, Pak. Sebenarnya ingin saya luruskan saja, saya memang tadi agak *soft* menyampaikannya tapi sebenarnya kalau kita melihat kondisi semua *stakeholder* di sana sepakat untuk melanggar aturan, bahkan Balai Bina Marga pun bisa saya anggap seperti itu memberikan pembiaran. Perhubungan juga begitu jembatan timbang *nggak* berfungsi kayak rumah hantu begitu, Pak. Polisi apalagi *nggak* tahu matanya di mana, lah inikan lewat-lewat depan mata itu di mana ya.

Nah, maksud saya harus ada *political will*, harus ada keberanian dari Dirjen Bina Marga menyurat kepada kementerian-kementerian tertentu, *stakeholder* tertentu untuk menutup jalan nasional bagi kegiatan penambangan apapun. Atau menutup jalan nasional untuk truk-truk yang *over demand*, yang *over load*. *Nah*, maksud saya Bapak mengacu pada Undang-Undang Jalan itu, karena Bapak *nggak* melanggar aturan. Bapak justru ingin menegakkan aturan tetapi yang harus menindak itukan tentu *stakeholder* yang lain atas dasar saya minta ada sikap dari Balai Jalan di sana atau dari Dirjen Bina Marga menyampaikan kepada Kapolri misalkan, agar supaya untuk Kakorlantas di sana betul-betul menertibkan tentang odol atau angkutan batubara ini, Pak. Karena jelas sekali seperti kita pahami sama-sama bahwa ini tidak boleh ya, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan tambang. Jadi memang harus pakai jalan hauling sendiri, jalan khusus sendiri. Dan, itu pada saat penertiban apa namanya penerbitan IUP oleh ESDM juga sudah dipersyaratkan hal-hal seperti itu, bahkan diatur sampai ke lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jadi hal ini bukan sesuatu yang baru dan harus diperdebatkan, sudah jelas aturannya tinggal pertanyaannya apakah kita mau menegakkan aturannya atau *nggak gitu loh*. Inikan Pemprov-nya juga pasti koordinasi dengan perusahaan-perusahaan tambangnya. Ada istilah koordinasi tanda petik koordinasi. *Nah*, kan Pemprov-nya kalau tegas seperti gubernur dari Kaltim misalkan atau Gubernur Jawa Barat tutup *nggak* boleh, *nggak* boleh jalan lagi itu. Jadi kalau dipelan-pelanin kayak gitu-gitu saja terus, Pak. *Nah*, minimal Dirjen Bina Marga menyurat, Pak, ke Polisi, Kapolri ataukah Kakorlantas, tertibkan di sana, Kapoldanya juga harus turun tangan. Jangan-jangan semuanya saling koordinasi, baik itu kita *nggak* usah bicara ya, Pak, nanti kan jelas koordinasi sana koordinasi sini bisa jalan. Kalau koordinasi di tambang ada istilah Pelakor (Penambang Lahan Koridor) di dalam hutan oke lah masih tidak kasat mata, ini kasat mata di jalan nasional iya kan, masih koordinasi saja gitu.

Nah, kan persoalan yang kayak-kayak begini, Pak. *Nah*, saya *nggak* mau masuk terlalu jauh ke wilayah ESDM, tapi minimal kita di Komisi V yang berwenang mengurus masalah jalan nasional tidak lagi membiar-biarkan kondisi ini. Termasuk nanti kalau saat rapat dengan Kementerian Perhubungan terutama Dirjen Perhubungan Darat yang notabene *alhamdulillah* mantan kapolda pasti mengerti tentang Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang LLAJ. Jadi *nggak* usah kita debat, *nggak* usah kita panjang-panjang, Pak Dirjen tegas saja, Pak, perintahkan, Pak, perintahkan minta kepada Kepolisian khususnya untuk tidak lagi membiarkan truk-truk angkutan tambang ini berjalan di jalan nasional.

Supaya kerugian negara kita kalau mau jauh-jauh, Pak, Bapak boleh meminta BPK mengaudit jalan nasional kita yang sudah kita kerjakan, itu kerugian negaranya ada, Pak, karena kita mungkin investasikan uang di situ. Enak saja dia dapat *benefit* dapat keuntungan lantas yang membayar masyarakat kita melalui APBN membangun jalan itu. *Nah*, ini lah maksud saya kalau Bapak mau lebih jauh lagi minta BPK-nya, Pak, audit, Pak, berapa kerugian kita terhadap jalan nasional yang rusak akibat dilalui oleh jalan

tambang itu. Dan, mereka harus mengganti itu kalau mau kita bicara perdata dulu TGR (Tuntutan Ganti Rugi), kalau *nggak* pidanakan, Pak, *gitu loh*.

Mungkin itu dari saya, Ketua, agak malu saya tadi kalau Ketua bilang begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Andi Iwan.
Masih tadi yang tadi *nggak*?

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Sedikit, sedikit.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan Pak Ketua, sabar Pak Dewo.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Hedy, ini aset kita kan, asetnya Bina Marga kan, secara aset Bina Marga punya kan? Maksud saya terdaftar sebagai asetnya Bina Marga. Ya kewenangan Bapak bikin surat saja kalau menurut saya. Sudah pernah bikin surat belum, Pak, biar kita dengar ini.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Balai itu sudah, Pak, bahkan sampai menteri ya pernah ya, sudah, sudah. Tapi nanti kita gini lah, Pak, Pak Menteri juga sudah ke Pak Kapolri sama Pak Menhub, tapi saya kira ini memang betul tadi dimensinya banyak jadi mungkin kita akan coba dengan Pak Bakri nanti apa namanya kita *sounding* ke ESDM, undang mereka atau gimana kita bicara-bicara dulu dengan Perhubungan, sehingga persepsinya sama dari ini berbagai pihak, Pak. Saya kira begitu, Pak, dan saya yakin bahwa ini bukan RDP tentang Jambi, Pak, jadi mungkin sudah cukup.

F-P. GERINDRA (SUDEWO. S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, ini sebentar, Pak.

Kalau saya setuju, Pak, ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sudah terjadi berlarut-larut seperti itu memang penanganannya mesti ekstra hati-hati, kita setuju itu tapi bukan berarti ini kita biarkan terus, Pak, *gitu loh*. Ini kan seperti yang kita bilang ini ada kerugian negara, Pak, melanggar ini

ada kerugian negara yang terjadi akibat apa namanya penggunaan yang salah terhadap jalan ini. Ini siapa yang mesti tanggung? Harusnya kan perusahaan tambang itu yang tanggung, Pak, harusnya.

Jadi saya rasa ya kita kasih kesempatan lah Pak Dirjen ya kepada Bina Marga untuk koordinasi dengan berbagai pihak. Saya piker cukup soal ini ya, biar nanti Bina Marga koordinasi dengan berbagai pihak mencari jalan keluar yang terbaik. *Nah*, kata lagu Almarhum Pance, bilang “kucari jalan terbaik”, kan *nggak* perlu saya nyanyikan juga di sini ya. Kita cari jalan terbaik, masalah ini selesai dan masyarakat pun tetap bisa beraktifitas ya. Kalau misalnya harus berhenti sebentar untuk membuat jalan baru, ya, kenapa tidak *gitu loh*, yang penting yang mana yang terbaiklah. Tapi kalau dibiarkan terus menerus sudah pasti ini melanggar, Pak, melanggar ini harusnya ada. Ini dari PAN yang *ngomong* ya, padahal PDI Perjuangan target di situ jadi gubernur, Pak.

Baik, saya rasa itu saja Pak Ridwan, silakan dilanjut.

F-P. GERINDRA (SUDEWO. S.T., M.T.):

Ya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Dewo masih soal Jambi atau yang lain?

F-P. GERINDRA (SUDEWO. S.T., M.T.):

Soal Jambi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam ini. Saya harus berbicara lagi ini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO. S.T., M.T.):

Saya ingin coba Dirjen Bina Marga berani *nggak* mengimplementasikan Permen PU Nomor 20 Tahun 2010. Itu kan aset negara yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, ya. Kemudian, dirusak oleh pihak lain sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan Aras. Tadi saya setuju, tidak hanya tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan di sana tetapi aset yang dirusak oleh pihak lain dengan nyata-nyata pelanggaran peraturan perundang-undangan ini, Dirjen Bina Marga punya instrumen peraturan untuk melakukan klaim penagihan begitu atau tidak, ya. Logikanya itu memang harus klaim, karena mereka mengakibatkan kerusakan punya aset Direktorat Jenderal Bina Marga, tapi ada aturan, ada payung hukumnya untuk itu *nggak*? Kalau memang ada mengapa tidak dilaksanakan.

Jadi yang pertama, berani *nggak* mengimplementasikan Permen itu, karena di tempat lain pernah terjadi hanya nyebrang saja nge-*cross* jalan saja

tidak dikasih. Yang di situ, yang di Jambi itu ratusan kilometre, ribuan truk tiap hari ya kan, dan itu sudah berjalan lama. Mengapa tidak dilakukan perlakuan hukum yang sama dengan tempat yang lain. Kalau memang Kementerian PUPR berani melakukan itu, dari nadanya Pimpinan Komisi, Pak Lasarus, dan semuanya Anggota ini, Pak Iwan semua, akan memberikan dukungan kepada Kementerian PUPR. Dukungan senyata-nyatanya dukungan kepada Kementerian PUPR untuk menegakkan aturan.

Karena apa? Karena dari Intruksi Gubernur pada bulan Oktober 2022 itu sudah nyata-nyata menabrak semua peraturan di atasnya, menabrak undang-undang, menabrak peraturan pemerintah, menabrak peraturan Menteri, tapi dia betul-betul sadar hal itu, cuma melakukan pembiaran juga. Tetapi asetnya pemerintah provinsi yang berupa jalan provinsi itu tidak diizinkan untuk bisa dilewati angkutan umum, kan *nggak fair*. Dia melanggar aturan tetapi merusak aset kementerian, aset Kementerian PUPR, sementara asetnya dia sendiri yang berupa jalan provinsi itu tidak diperbolehkan untuk digunakan.

Nah, ini dengan nada kawan-kawan dan juga Pimpinan Komisi V, maka saya ingin mendapatkan satu gambaran yang jelas dari Kementerian PUPR, dari sisi Kementerian PUPR sepenuhnya akan kami dukung.

Saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dewo.

Cukup ya? Sekarang, Pak Dirjen masih ada tanggapan atau sudah cukup, Pak Dirjen Bina Marga, silakan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Mungkin sedikit karena Pak Dewo tadi bertanya, mungkin saya jawab sedikit. Saya kira begini, Pak, memang jalan di kita itu ada semacam pembagian tugas. Jadi, yang bertugas secara prasarana fisik membangun dan memelihara itu ada di Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga. Untuk pengaturan lalu lintasnya yang punya kewenangan itu adalah Kementerian Perhubungan, itu sebabnya jembatan timbang ada di Kementerian Perhubungan, kemudian *enforcement*-nya ini di polisi. Jadi, ini memang multi *stakeholder* ya, nanti kita sudah menyampaikan saya kira surat dari Pak menteri permasalahan Jambi ini nanti izinkan nanti ke depan saya untuk mencoba mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Memang karena memang pengelolaan jalan di kita kan sangat gotong royong gitu kan, agak berbeda dengan di negara lain.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Ketua.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, Pak, kebetulan tanggal 8 nanti, 8 Februari, jam 10 pagi kita ada rapat soal evaluasi Nataru. *Nah*, di situ kan nanti ngumpul Menteri PU, Menteri Perhubungan, Korlantas. Tolong ingatkan ya kita bahas soal Jambi ini cocok ya, ya saya pikir cukupkan sampai di situ ini sudah setengah jam kita bahas soal Jambi ini. Nanti kita sembari juga mungkin beberapa hari ini Pak Dirjen koordinasi ke kiri kanan dulu kepada *stakeholder* yang berguna untuk itu.

Silahkan, Pak Ridwan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bapak Ketua.
Ibu Dirjen, silakan, Ibu Dirjen.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, terima kasih, Bapak, atas kesempatannya.

Tadi ada pertanyaan dari Bu Sri, terkait dengan masalah *stunting*, PKE, ya, untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem, karena Penanganan Kemiskinan Ekstrem ini tentu kaitannya dengan *stunting*. Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penanganan *stunting* ini yang terkait secara langsung adalah penanganan air minum dan juga penanganan untuk air limbah. Untuk air minum tentunya kita harus mengupayakan agar air tersebut masuk di dalam lokasi kawasan kumuh tersebut. Dan, limbah ini adalah untuk pembangunan toilet ya, juga toilet individual, komunal, dan juga ada tangki *septic*, Bu.

Nah, hal itu tentunya kami sangat setuju, Ibu, apabila nanti kita harus ada standar yang biasanya toilet-toilet itu dibangunnya di luar ya, secara komunal, mungkin nanti untuk BSPS nanti akan kita masukkan di dalam rumah dan ini nanti adalah salah satu dari kamar mandi atau toilet yang nanti harus masuk di dalam rumah tersebut ada standarnya. Termasuk juga untuk dapur, aliran drainasinya, ininya seperti apa itu nanti akan kita masukkan, kami akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perumahan, Ibu.

Kemudian yang kedua, ini terkait dengan masalah penanganan pasca pembangunan dari infrastruktur-infrastruktur yang terbangun seperti untuk G20, kemudian KSPN-KSPN yang seperti Labuan Bajo, kemudian juga Borobudur, ya. Saat ini kami sebenarnya sedang membuatkan semacam skema, Bu, untuk pengelolaan ya pengelolaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan suatu badan yang profesional untuk melakukan penanganan bangunan-bangunan tersebut, seperti misalnya Mandalikan dengan ITDP. *Nah*, Labuan Bajo di sini untuk yang Rinca itu masih ada kaitannya dengan Kementerian Perhubungan dan juga untuk KLHK, Bu, karena itu juga Rinca itu

dengan KLHK, kemudian laut Bunaken itu juga dengan KLHK juga. Kemudian Kalau Taman Mini dan Borobudur itu dengan TWC.

Nah, di sini kami sampaikan bahwa memang infrastruktur yang kita bangun tuh, harus kita kembalikan dulu kepada yang mempunyai lahan Pemda, namun nanti Pemda harus kalau tidak Pemda juga kementerian atau lembaga ya. Karena seperti yang Rinca kemudian juga Labuan Bajo, karena itu ada pelabuhannya berarti nanti kami harus kembalikan kepada Kementerian perhubungan. *Nah*, nanti untuk yang Pemda ini nanti mesti harus ada kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga ya, pihak ketiga. Seperti yang tadi saya sebutkan misalnya ada TWC untuk Borobudur, kemudian di Taman Mini juga TWC juga.

Nah, nanti ada juga *in journey*, Bu, itu salah satu calon untuk melakukan pengelolaan, tapi itu nanti akan dilakukan pelelangan, Ibu. *Nah*, ini sekarang kita sedang membuat semacam surat edaran atau surat proses sebagai landasan untuk melaksanakan pelelangan tersebut ya. Namun, kami sudah siapkan bagaimana nanti kelembagaannya dan bagaimana prosesnya untuk itu, mungkin demikian, Bu. Jadi, infrastruktur yang kita bangun mudah-mudahan bisa terawat. Dan, saya harapkan tadi saya juga sudah berkoordinasi juga dengan Dirjen Bangda, seluruh infrastruktur yang dibangun oleh Cipta Karya ini sebagian besar bukan dikelola oleh Cipta Karya sendiri tapi memang diserahkan, kalau *nggak* kepada daerah juga Kementerian/Lembaga. Mungkin demikian, Bu, ini harus dikelola dengan baik.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam.

Pak Andi Iwan, ada tambahan buat Bu Dirjen.
Silakan.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ibu Dirjen, pertama saya terima kasih ya, ini Atakkae sudah masuk di 2023. Tapi yang ingin saya ingatkan kepada Bu Dirjen, waktu kita bahas 2022 juga sudah masuk, Bu, tapi *nggak* dilaksanain. *Nah*, mudah-mudahan sekarang sudah masuk berkas, Ibu, jangan sampai hilang lagi nanti. Kemudian yang 2022 kemarin menyangkut masalah SPAM Tempe Kota Sengkang, Ibu sudah masukkan, sekarang malah *nggak* dilaksanakan di 2022, sekarang 2023 malah hilang.

Saya ingatkan itu lagi, Bu, jadi sudah 2 tahun saya minta ke Ibu ini. Janjinya kemarin kan kalau apa sumber daya air sudah laksanakan Ibu akan programkan, itu sudah dilaksanakan oleh SDA, Bu, jadi saya ingatkan kembali.

Di sini saya *nggak ngelihat* SPAM Kota Sengkang, jadi mohon agar dimasukkan kembali di target prioritas Ibu di 2023. Dan, mudah-mudahan ini sudah bisa jadi dasar buat kami bahwa *insya Allah* akan benar-benar dilaksanakan, *nggak* PHP lagi Ibu Dirjen ya. Ya, baik, Bu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Pimpinan.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Fauzi silakan, Pak Fauzi.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Maaf senior ini, sebentar saja, saya sebentar, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh.

Ibu Dirjen, saya hanya ingin mengusulkan hasil dari pembicaraan tadi kita di ruang makan. Apa yang saya tanyakan tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Bu Dirjen. Cuma agar jawaban tadi juga diinformasikan atau dipahami oleh teman-teman Balai di di bawah *gitu*. Ini juga mungkin untuk Dirjen-Dirjen yang lain karena kadang-kadang ada beberapa program apa yang kita putuskan di sini di bawah, beda *gitu*. Contohnya tadi saya tanya misalkan program MCK Pesantren, kalau di bawah di Sulawesi Selatan itu *nggak* kalau yang sudah dapat, Ibu Dirjen tadi bilang bisa *gitu*. Makanya saya minta tolong Bu Dirjen agar itu disampaikan ke teman-teman balai di bawah.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Fauzi.

Saya pikir Bu Dirjen sudah catat itu, ya, nanti disampaikan kepada para kepala balai yang ada di seluruh Indonesia. Pak Dewo.

F-P. GERINDRA (SUDEWO. S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Kepada Dirjen Cipta Karya, saya sampaikan terima kasih itu banyak program pembangunan pasar tradisional dan beberapa sektor yang lain. Yang ingin saya memberikan masukan adalah pembangunan pasar tradisional saja, Bu Dirjen. Pasar yang dibangun oleh Dirjen Cipta Karya ini kelihatan megah,

mewah, dan memberikan satu pemandangan yang eksotis di sebuah kota. Tetapi, Bu Dirjen itu menyisakan banyak persoalan, tolong dilakukan survei, Bu, setelah dibangun pasar itu berjalan ada persoalan atau tidak begitu ya. Karena saya tahu banyak para pedagang pasar itu di tetangga saya, kawan-kawan saya menyampaikan laporan, pasarnya kelihatan megah, Pak, tetapi para pedagang sepi karena males sampai ke lantai 2, sampai ke lantai 3. Bahkan pedagang pun harus mengeluarkan ongkos yang lebih tinggi, karena angkut barangnya, naik turunnya. Apa yang menjadi dampak daripada kondisi semacam itu, banyak pasar Informal, lapak yang melebar ke mana-mana ke jalan raya. Jadi penting desain pasar itu mengakomodir masukan dari para pedagang. Tidak perlu saya beri contoh pasar mana semuanya seperti itu, semuanya pasar seperti itu. Yang dibangun oleh Cipta Karya, yang di desain oleh Cipta Karya itu ternyata tidak sesuai dengan kultur pedagang, tidak sesuai dengan kultur pembeli terhadap pasar tradisional. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari anggaran di Cipta Karya sebesar 25 sekian triliun itu, itu 95% lebih bersumber dari rupiah murni. Sayang kalau banyaknya anggaran tapi bersumber dari APBN, sementara banyak, mestinya sektor-sektor di Cipta Karya yang di-KPBU-kan. Misalnya SPAM, kalau SPAM sampai harus menggunakan APBN ini kan sangat disayangkan, karena SPAM itu merupakan sektor yang menarik bagi investor. Maka pentingnya koordinasi dengan Pak Heri, Direktorat Jenderal Infrastruktur *anu*, Pembiayaan Infrastruktur. Ya, ini duduk bersama tapi mungkin di kantor sana di Pattimura jarang koordinasi *gitu* ya. Banyak sekali SPAM yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, oleh Cipta Karya yang berada di kabupaten, di daerah, ingin dikembangkan oleh kabupaten, tapi terkendala pelimpahan aset, masih menjadi aset Kementerian PUPR.

Kalau dilimpahkan ke pemerintah daerah itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan daerah siap mengalokasikan anggaran untuk itu, karena memang sesuai kebutuhan daerah, ya. Tapi proses pelimpahan aset ternyata juga tidak begitu mudah, sulit dilakukan oleh Kementerian PUPR, entah apa ini, saya *nggak* tahu persoalannya. Padahal dari Kementerian PUPR sendiri pasca membangun juga tidak pernah melakukan satu pengembangan, ya, tidak ada satu perawatan yang Intens. Kalau dibangun kemudian diserahkan asetnya ini kepada pemerintah daerah mungkin itu yang lebih tepat guna, lebih efektif. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Masih ada?

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.);

Izin, Ketua, satu lagi, Pak Ketua.

F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAHALKADRIE, S.H., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Satu lagi, Suryadi.

F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAHALKADRIE, S.H., M.H.):

Pimpinan, tadi saya sudah.

KETUA RAPAT:

Pak Syarief, silakan.

F-P. GOLKAR (Dr. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

Ali mufthi.

F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAHALKADRIE, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Mungkin ini masukan saja berkaitan dengan Bu Dirjen Cipta Karya, berkaitan dengan kegiatan yang berbasis ke masyarakat terutama berkaitan dengan masalah WC itu. Mungkin perlu dievaluasi berkaitan dengan *septic tank* itu, yang pakai pabrikan itu. Saya kira apa mungkin kalau tidak pakai itu kan lebih bisa jumlah dari kuantitasnya bisa bertambah, karena cukup mahal juga itu berkaitan biasa masyarakat ini itu kan biasa membuat itu kan sudah terbiasa. Termasuk yang di pesantren maupun yang di rumah-rumah penduduk, karena yang pakai pabrikan itu cukup mahal juga, gitu. Saya kira itu coba dievaluasi lah karena itu banyak juga yang disampaikan ke kita.

Saya kira itu saja, Pak Pimpinan.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Izin tambahan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Suryadi, silakan, Pak Suryadi.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik, terima kasih.

Saya menambahkan terkait dengan program yang berbasis masyarakat. Kami mendapat pengaduan dari beberapa kepala desa maupun lembaga,

ketika didatangi untuk verifikasi untuk memenuhi *readiness criteria*. Kadang-kadang mereka datang itu seperti hanya tukang sensus gitu, Bu. Maksud saya dari sekian daftar yang harus dipenuhi mereka datang kemudian contrenge gitu, begitu tidak tercoreng, *oh*, tidak memenuhi syarat. Maksud saya ini harus lebih humanis, karena desa atau lembaga yang kita usulkan sebagai penerima program berbasis masyarakat ini juga tidak tahu bahwa apa yang harus disiapkan.

Sehingga kedatangan mereka mestinya datang “*oh*, Pak, ini sesuai dengan usulan Bapak, ini persyaratannya tolong ini dilengkapi, begini caranya”, dan seterusnya begitu. Jangan datang ada ini, Pak, *tret-tret* gitu setelah itu pergi. Kami dapat laporan *oh* tidak memenuhi syarat gitu. Jadi ini perlu ada semacam arahan, ya, kepada tim yang melakukan survei agar mereka memberikan opsi-opsi. Ketika ini belum terpenuhi “*oh*, Pak, ini caranya, *oh* ini, ini”, begitu. Supaya itu karena banyak yang tiba-tiba dikatakan tidak memenuhi syarat, bahkan mereka tidak menemui kepala Desa atau gitu, hanya bertanya *oh* ini *nggak* ada, ini *nggak* ada, coret-coret contrenge dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mungkin begitu saja ini catatan saja, Bu.

Terima kasih, Pak Ketua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Suryadi.
Pak Ali Mufthi, silakan.

F-P. GOLKAR (Dr. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Apa yang saya sampaikan hanya menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR di lapangan. Pertama, kalau kita memahami IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) tentunya seluruh aktivitas kegiatan itu adalah berbasis masyarakat. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Cipta Karya ini agar PISEW itu jangan *ready mix*, karena itu beli ya, karena itu beli. Dan, kayaknya pendamping Ibu yang di lapangan selalu menyarankan itu. Kalau itu yang kita lakukan tentunya *nggak* ada gunanya IBM itu, Bu. Katanya kita ini ingin menciptakan lapangan kerja buat masyarakat. Itu pertama.

Yang kedua terkait dengan LPK, saya kadang-kadang juga *nggak* tahu ini proyeknya PUPR, apa ini lembaga lain, gitu, karena saya menemukan lembaga lain yang menyerahkan proyek ini. Saya komplain ke Balai dia *nggak* tahu itu, Bu. Tolong ini juga diluruskan karena kayaknya lembaga lain itu sangat *powerfull* di dalam persoalan ini.

Yang berikutnya, saya dengar, Bu, katanya (suara kurang jelas) sekarang anggaran diturunkan dari 500 menjadi 350. Ya, tolong itu dikembalikan lagi seperti semula karena memang kebutuhan kalau kita bicara *stunting*, kita bicara apa saja, itu selalu berkaitan dengan persoalan ini. Kalau dikurangi kan, berarti jumlahnya dikurangi juga, padahal kebutuhannya sudah sangat masyarakat sangat membutuhkan persoalan itu.

Yang terakhir, dulu saya pernah mengusulkan rehab SD, Bu, di Ponorogo. Saya tunggu, Bu, itu bagaimana kapan itu direalisasikan. Karena sudah sangat parah, sudah ditunggu oleh wali murid, oleh siswa, oleh masyarakat agar itu diselesaikan, karena memang itu ada di Ibu, itu.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ali Mufthi.
Silakan, Ibu Dirjen, silakan.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, terima kasih, Bapak.

Pertama, untuk Pak Andi Iwan Aras, Attakae kami masukkan, Pak, lagi ya. Kemudian SPAM Sengkang sepertinya sudah masuk, Pak, sepertinya ya kemarin karena memang kami menunggu dari SDA. Ya, mudah-mudahan ini nanti, ya ini kan antara lain, Pak, ya antara lain, jadi masih ada, antara lain, Pak, itu, Pak. Kemudian untuk LPK, Bapak, karena pesantren itu kan laki-laki dan perempuan, *loh* bapaknya sudah *nggak* ada, laki-laki sama perempuan. *Nah*, nanti kalau sudah ada laki-laki mungkin perempuan juga harus mungkin yang terpisah-pisah kami sampaikan.

Pak Dewo terima kasih tadi untuk masalah pasar kami akan melakukan evaluasi terhadap pasar-pasar yang memang pasar ini adalah sebagian besar permintaan dari daerah yang harus kita evaluasi untuk desainnya, agar bangunan-bangunan ini juga lebih mengena kepada masyarakat, lebih bermanfaat untuk masyarakat, dan bahkan juga bangunan gedung hijau pun juga harus memenuhi persyaratan dari pasar-pasar yang kita bangun nanti. Kita ada beberapa evaluasi yang mudah-mudahan Tahun 2023 ini, kita akan rubah, Pak, untuk pasar-pasar yang tradisional yang akan kita bangun.

Kemudian, untuk masalah alokasi anggaran memang kami melihat bahwa air minum nanti banyak yang harus kita KPBU-kan, Pak. Dan, saat ini kami justru sudah memulai, misalnya ada Jatiluhur, Karian Serpong, Juanda, Umbulan kemarin juga sudah ada, Semarang Barat, Lampung, itu sudah kami upayakan dengan menggunakan KPBU-KPBU. Dan, Bapak, apa yang kita bangun kegiatan-kegiatan untuk sistem penyediaan air minum yang kita

bangun ini bukan dikelola oleh pusat, Pak, tapi semuanya diserahkan oleh pemerintah daerah, jadi nanti yang mengelola adalah pemerintah daerah. Dan, pemerintah daerah ini kalau misalnya untuk IPA dan jaringannya mesti akan diserahkan kepada PDAM sebagai lembaga operasional dari *pengelo*, operasional pengelolaan air minum di sana.

Kemudian Pak Syarief, tadi untuk *septic tank* jangan pabrikan, ini akan menjadi evaluasi kami juga, Bapak, apakah ini karena faktor kecepatan saja ini, tapi kami akan evaluasi kembali untuk hal ini, nanti bersama Direktur Sanitasi.

Kemudian, Pak Suryadi, ini terkait dengan IBM yang ini kami mohon nanti juga seluruh Balai yang ada di sini ini menjadi catatan kita semuanya. Kalau survei tentunya kita harus berbicara apa yang dibutuhkan, tidak hanya, hanya sekedar ceklis-ceklis saja sehingga nanti kepala daerah itu juga memahami apa yang harus dibangun. Ini akan menjadi catatan kami, Bapak.

Pak Ali Mufthi, untuk PISEW, ya, mungkin IBM juga, nanti kita akan coba evaluasi kembali, Pak, untuk LPK juga. Kemudian, terkait dengan SPAL-D dan sebagainya ini kami harus lebih banyak, Pak, targetnya. Ya, targetnya harus lebih banyak sehingga alokasinya kami turunkan tapi mudah-mudahan kualitasnya tidak berubah, Pak. Untuk SD Ponorogo, kami sedang melakukan verifikasi, Pak. Mungkin demikian, Bapak Pimpinan Rapat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Dirjen.

Pak Dirjen Pembiayaan, silakan, tadi ada satu pertanyaan tadi.

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. TRISAPUTRA ZUNA, S.E., M.T.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Tadi ada pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu, *enjah*, Bu. Di DJPI memang apa tupoksinya yang satu berkaitan dengan pembiayaan perumahan, lalu yang kedua berkaitan dengan KPBU, seperti Pak Dewo tadi sampaikan. *Nah*, dalam proses KPBU ini kita menyiapkan studi kelayakan, *nah* dalam proses ini tentu berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan tata ruang dan yang lainnya. Ini intens kita lakukan, Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen.

Dari BPIW kan tidak ada ya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tadi, silakan. Pak Roberth Rouw, tertulis saja ya.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):

Siap, Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana mau menjawab *nggak* ada orangnya juga.

Baik, demikianlah kira-kira penyampaian Pak Dirjen, kemudian Ibu Dirjen, kemudian Bapak Dirjen Pembiayaan, sudah jelas semuanya. Sekarang mungkin saya sedikit ada tambahan, tapi hanya untuk dicatat, Pak, ya. Kepada Pak Dirjen Bina Marga itu ada masalah tentang jembatan gantung yang ada di Kabupaten Bombana. Itu masalahnya adalah pas kontrak berakhir akhir tahun pekerjaan sudah selesai belum dibayar. *Nah*, belum dibayar mungkin karena barangkali ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, tetapi pekerjaan sudah selesai. Oleh karena itu, barangkali saya sudah kontak tadi kepala balai rupanya belum diputus kontraknya. Jadi, berarti bisa dianggarkan dengan anggaran Tahun 2023 ini, tentu dengan cara Pak Dirjen sendiri. Kemudian, dalam waktu dekat ini Pak Kepala Balai itu jalan akan menghadap Pak Dirjen tentang itu. Maksudku adalah ini kita jangan membuat polemik, Pak, walaupun kecil tapi kalau jadi polemik jadi masalah besar, Pak.

Kemudian Ibu Dirjen, Bu Diana, yang kota skala kawasan di Lagasa Kabupaten Muna, itu kan sebenarnya terlalu sedikit anggarannya sehingga tidak akan terselesaikan dengan baik, dukungannya ada di situ. *Nah*, kalau ada sisa anggaran, Bu, ya saya minta tolong itu menjadi perhatian berikutnya. Makanya *ndak* perlu dijawab, Pak, ini hanya penyampaian saja.

Kemudian Dirjen Pembiayaan, saya minta tolong itu tentang jembatan penghubung Buton-Muna. Itu mungkin, apa namanya, sebaik mungkin secepatnya jauh lebih baik, karena kita menghadapi tahun politik, mudah-mudahan itu segera terwujud.

Baiklah sekarang kita sampai kepada kesimpulan, silakan kesimpulan.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI Dengan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa, 24 Januari 2023.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR dalam APBN Tahun Anggaran 2022.

- a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas Capaian Realisasi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 1. Ditjen Bina Marga 93,71% Realisasi Keuangan, Sementara Realisasi Fisik adalah 96,23%;
 2. Ditjen Cipta Karya Realisasi Keuangan 95%, sementara Realisasi Fisik adalah 96,92%;
 3. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Realisasi Keuangan 85,31%, Realisasi Fisik 85,94%;
 4. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW Capaian Keuangan adalah 82, Realisasi Keuangan ya 82,57%, sementara Realisasi Fisik adalah 83,49%.
 - b. Terhadap program kegiatan di atas, Tahun Anggaran 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BPIW agar penyelesaian atau menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BPIW Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan, serta usulan Komisi V DPR RI.
 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri dalam mengatasi masalah kerusakan jalan nasional akibat lalu lintas angkutan pertambangan dan perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagaimana Komisi V yang terhormat, setuju?

Kemudian, dari pemerintah, setuju? Setuju semua ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan selama berlangsung rapat ini. Sebelum acara rapat hari ini ditutup, kami memberikan kesempatan kepada Pak Dirjen atau Ibu Dirjen yang memberikan sambutan.

Silahkan, Ibu Dirjen.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, terima kasih.

Yang kami hormati dan yang kami banggakan Pimpinan Komisi V DPR RI juga beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang kami banggakan,

Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan-masukan dan saran-saran yang disampaikan pada saat RDP hari ini. Masukan dan saran ini akan kami tindak lanjuti ya, dan tentunya juga akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami ke depannya di Tahun 2023 ini. Dan, kurang lebihnya kami Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Dirjen Bina Marga, dan juga Kepala BPIW mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat kita menjawab ataupun merespon dari masukan Bapak-Ibu sekalian.

Demikian, terima kasih dan *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam.

Demikian telah disampaikan kata penutup dari Pemerintah, rapat ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.40 WIB)

JAKARTA, 24 Januari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002